



LAPORAN TAHUNAN
PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS)
NASIONAL TAHUN 2012

FORUM KOORDINASI NASIONAL (FORKONAS)
PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
2013

Kata Pengantar

Puji syukur kami persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya Laporan Nasional Pendidikan untuk Semua (PUS) Tahun 2012 dapat diselesaikan.

Laporan Tahunan Nasional PUS ini disusun oleh Pengurus Forum Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua (PUS), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menkokesra RI Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Forum Koordinasi Nasional Pendidikan untuk Semua (PUS), dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Nomor: KEP-437/B/PR/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Forum Koordinasi Nasional Pendidikan untuk Semua (PUS), yang berisi laporan hasil pelaksanaan 6 (enam) program Pendidikan untuk Semua (PUS) yaitu: (1) Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Pendidikan Dasar; (3) Pendidikan Keaksaraan; (4) Pendidikan Kecakapan Hidup; (5) Pendidikan Pengarusutamaan Gender; dan (6) Peningkatan Mutu Pendidikan.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka pembangunan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat bermanfaat.

Jakarta, Mei 2013

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Nonformal dan Informal

selaku Ketua Harian Forkonas PUS

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	5
D. Ruang Lingkup	5
E. Sasaran.....	6
BAB II PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).....	7
A. Analisis Situasi dan Kondisi	7
1. Mekanisme Pelaksanaan	7
2. Kinerja Pelaksanaan Program	12
3. Analisis Pelaksanaan Program	13
B Hasil Pelaksanaan Program.....	17
1. Kebijakan Nasional	17
2. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan	17
3. Sasaran dan Target Capaian	19
4. Program Kegiatan.....	19
BAB III PENDIDIKAN DASAR.....	22
A. Analisis Situasi dan Kondisi	22
1. Mekanisme Pelaksanaan Program	22
2. Kinerja Pelaksanaan Program Pendidikan Dasar.....	24
3. Analisis Pelaksanaan Program	32
B. Hasil Pelaksanaan Program	36
1. Kebijakan Nasional Layanan	36
2. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan	37
3. Sasaran dan Target Capaian.....	38
4. Program Kegiatan	38
BAB IV PENDIDIKAN KEAKSARAAN	41
A. Analisis Situasi dan Kondisi	41
1. Mekanisme Pelaksanaan	41
2. Kinerja Pelaksanaan Program	42
3. Analisis Pelaksanaan Program	45
B. Hasil Pelaksanaan Program	49
2. Kebijakan Nasional.....	49
3. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan	51
3. Sasaran dan Target Capaian.....	56
BAB V PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (PKH)	57
A. Analisis Situasi dan Kondisi	57
1. Mekanisme Pelaksanaan Program	57
2. Kinerja Pelaksanaan Program	58
3. Analisis Pelaksanaan Program	62
B. Hasil Pelaksanaan Program	67
1. Kebijakan Nasional.....	67
2. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan	69
3. Sasaran dan Target Capaian	72
4. Program Kegiatan	75

BAB VI PENDIDIKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	79
A. Analisis Situasi dan Kondisi	79
1. Mekanisme Pelaksanaan Program	79
2. Kinerja Pelaksanaan Program	80
3. Analisis Pelaksanaan Program	86
B. Hasil Pelaksanaan Program	86
1. Kebijakan Nasional.....	86
2. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan	88
3. Sasaran dan Target Capaian.....	90
4. Program dan Kegiatan.....	90
BAB VII PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	92
A. Analisis Situasi dan Kondisi	92
1. Mekanisme pelaksanaan Program	92
2. Kinerja Pelaksanaan Program	92
3. Analisis Pelaksanaan Program	96
B. Hasil Pelaksanaan Program	100
1. Kebijakan Nasional.....	100
2. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan	101
3. Sasaran dan Target Capaian	102
4. Program Kegiatan	103
BAB VIII PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Rekomendasi.....	106

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan yang berpihak pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan merupakan langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Kualitas sumber daya manusia memiliki dampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya maupun pertahanan dan keamanan.

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), pada tahun 2011 melalui *Education for All Global Monitoring Report (EFA-GMR)* juga mengeluarkan peringkat Indeks Pembangunan Pendidikan (*EFA Development Index/EDI*). EDI diukur dari angka partisipasi murni SD/MI, angka bertahan sampai tingkat V (lima) Sekolah Dasar, angka melek huruf umur diatas atau sama dengan 15 tahun, dan indeks spesifik gender. Peringkat EDI Indonesia (*EFA Development Index/Indeks Pembangunan Pendidikan*) mengalami peningkatan dari peringkat 69 dari 127 negara pada tahun 2011 menjadi peringkat 65 dari 120 negara pada tahun 2012.

Untuk lebih meningkatkan peringkat EDI Indonesia, Pemerintah telah menyusun program-program strategis yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan. Program-program strategis tersebut diselaraskan dengan kebijakan pembangunan melalui 6 (enam) koridor pembangunan ekonomi yaitu: *Pertama*, koridor Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energy nasional. *Kedua*, koridor Jawa sebagai pendorong Industri dan Jasa Nasional. *Ketiga*, koridor Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energy nasional. *Keempat*, koridor Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan

pertambangan nasional. *Kelima*, koridor Bali-NTB-NTT sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. *Keenam*, koridor Papua-Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energy, dan pertambangan nasional.

Tujuan penyelarasan terhadap 6 (enam) koridor tersebut adalah untuk mendukung secara penuh kebijakan Pemerintah dalam memberdayakan semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Program-program strategis juga diselaraskan dengan kebijakan *pro poor*. Kebijakan *pro poor* bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengangkat harkat dan martabat mereka agar menjadi warga negara yang terpenuhi seluruh hak dan kewajibannya.

Strategi yang ditempuh dalam kebijakan *pro poor* antara lain dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat miskin, terutama yang tinggal di daerah 3T (terpencil, terluar, dan terisolir) untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan, termasuk didalamnya pembangunan pendidikan.

Menindaklanjuti konvensi Dakar tersebut telah dibentuk Forum Koordinasi Pendidikan untuk Semua (PUS) mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota. Forum ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor: B.10/MENKOKESRA /I/2003 tanggal 27 Januari 2003, dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor: KEP-437/B/PR/2011, tanggal 7 Maret 2011, tentang instruksi kepada para Gubernur, para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk membentuk Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) di wilayah kerja masing-masing.

Forum Koordinasi di tingkat pusat dan tingkat daerah kemudian membentuk 6 (enam) kelompok kerja (pokja) yaitu pokja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pokja Pendidikan Dasar (Dikdas), pokja Pendidikan Keaksaraan, pokja Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), pokja Pengarusutamaan Gender (PUG), dan pokja Peningkatan Mutu Pendidikan.

Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) terdiri dari lembaga lintas kementerian dan instansi pemerintah serta lembaga sosial masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan sebagai wadah untuk mensinergikan, mendorong, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Forum Koordinasi PUS memiliki 5 (lima) fungsi utama yaitu (1) merumuskan program, tahapan, tata-cara penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengembangan program serta kegiatan PUS sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kerja; (2) menyusun Rencana Aksi PUS baik rencana jangka panjang, menengah, dan pendek; (3) melakukan koordinasi, konsolidasi, sosialisasi, diseminasi, dan advokasi kepada seluruh komponen masyarakat dengan para pemangku kepentingan; (4) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan terkait dengan 6 komponen target PUS; dan (5) menyusun laporan dan review pelaksanaan program secara berkala baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

Target yang dicapai dari program Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) pada tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan Dakar adalah: *Pertama*, komitmen pemerintah untuk memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. *Kedua*, jaminan pemerintah bahwa pada tahun 2015 semua anak, khususnya anak-anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses yang sama dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas. *Ketiga*, jaminan pemerintah bahwa kebutuhan belajar seluruh penduduk dapat dipenuhi secara adil. *Keempat*, komitmen pemerintah terhadap perbaikan 50% tingkat keniraksaraan orang dewasa, terutama kaum perempuan, serta akses yang adil di tingkat pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi orang dewasa. *Kelima*, komitmen pemerintah untuk menghapus disparitas gender di tingkat pendidikan dasar dan menengah serta menjamin terwujudnya kesetaraan gender dalam

pendidikan. *Keenam*, komitmen pemerintah untuk perbaikan semua aspek yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, sehingga memperoleh hasil belajar yang diakui dan terukur.

Terkait dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, Pemerintah cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 4 (empat) kebijakan, yaitu: *Pertama*, pembangunan satuan pendidikan. *Kedua*, penyempurnaan sistem pembelajaran. *Ketiga*, penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan *Keempat*, bantuan pendanaan peserta didik. Dengan telah dikeluarkannya berbagai kebijakan tersebut, pembangunan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, dan kesejahteraan rakyat lebih merata.

Sebagai pertanggungjawaban kerja, Pengurus Forum Koordinasi Nasional (Forkonas PUS) tahun 2011, maka disusunlah laporan hasil pelaksanaan program PUS Tahun 2011.

Diharapkan dengan disusunnya laporan tahunan tepat waktu secara rutin permasalahan, hambatan dapat diketahui lebih awal, prestasi dapat dicapai dan kebijakan tahun berikutnya dapat direncanakan lebih baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 2;
2. *World Fit for Children* 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Aniaya, Eksploitasi dan Kekerasan;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat 1 dan ayat 5, serta pasal 26;
4. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011-2014, Kemdiknas;

5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 26 Tahun 2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Forum Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor: KEP-154/B/PR/2012, tanggal 5 Maret 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Forum Koordinasi Nasional Pendidikan untuk Semua (PUS/EFA) tahun 2012.

C. Tujuan

Penyusunan laporan pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) tahun 2012, bertujuan untuk:

1. Menyampaikan informasi tentang kebijakan dan strategi pelaksanaan program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2011;
2. Memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2011;
3. Menganalisis data dan informasi PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2011 sebagai *baseline* data untuk perencanaan program PUS hingga tahun 2015.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan PUS tahun 2012 meliputi:

1. Rumusan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan;
2. Laporan capaian kinerja pelaksanaan program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan.

3. Analisis situasi dan kondisi pelaksanaan program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan analisis kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan.

E. Sasaran

1. Dokumen Laporan Tahunan PUS disusun sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan PUS dan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan program PUS tahun 2012;
2. Bahan acuan untuk menyempurnakan Rencana Aksi Daerah (RAD) bagi pengurus Forum PUS dan anggota Kelompok Kerja Forum PUS tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

A. Analisis Situasi dan Kondisi

1. Mekanisme Pelaksanaan

Layanan PAUD dilaksanakan oleh berbagai institusi, yaitu: (1) Taman Kanak-Kanak (TK), (2) Raudhatul Athfal (RA), (3) Kelompok Bermain (KB), (4) Taman Penitipan Anak (TPA), (5) Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), (6) Satuan PAUD Sejenis (SPS) misalnya PAUD Terintegrasi Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB).

a. Taman Kanak-Kanak (TK)

Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan salah bentuk layanan PAUD. Tujuan penyelenggaraan TK adalah untuk membantu meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta anak didik untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, melalui kegiatan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Sasaran TK adalah anak usia 4-6 tahun atau usia persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Penyelenggaraan TK berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

b. Raudhotul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA)

RA/BA merupakan salah satu bentuk PAUD. Perbedaan RA/BA dengan TK adalah pada nuansa keagamaannya, di mana pembalajaran nilai-nilai agama Islam pada RA/BA lebih menonjol dan menjiwai keseluruhan proses belajar mengajar.

Tujuan penyelenggaraan RA/BA adalah untuk membantu meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, melalui kegiatan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Sasaran RA/BA adalah anak-anak yang berusia 4-6 tahun atau usia persiapan untuk memasuki pendidikan dasar. Penyelenggaraan RA/BA berada dibawah pembinaan Kementerian Agama yang dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Agama.

c. Kelompok Bermain (KB)

Kelompok Bermain merupakan salah satu bentuk layanan PAUD yang berfungsi membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan potensi anak seoptimal mungkin sesuai dengan tahap tumbuh-kembang anak melalui kegiatan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Sasaran KB adalah anak usia 2 – 6 tahun.

Program KB memiliki layanan bimbingan kepada anak dan orangtua. Layanan kepada anak berupa bimbingan untuk mengenal dirinya, bakat dan minatnya serta mengenal lingkungan di sekitarnya. Layanan bimbingan kepada orang tua ditujukan untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang program pembelajaran di KB, pembinaan tentang pola pengasuhan dan perawatan (misalnya tumbuh kembang, gizi, dsb), serta memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan anak mereka dan cara memberikan pengasuhan yang tepat sesuai dengan karakteristik dan permasalahan setiap anak.

d. Taman Penitipan Anak (TPA)

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk layanan yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak. Sasaran layanan TPA adalah anak usia 0 - 6 tahun. Jangka waktu anak tinggal di TPA berkisar antara 8-10 jam per hari selama 5-6 hari per minggu.

Penyelenggaraan TPA secara umum bertujuan untuk memberikan layanan kepada anak usia 0 – 6 tahun yang terpaksa ditinggal orang tuanya karena pekerjaan atau hal lain, serta memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial.

TPA memberikan berbagai layanan yang diberikan adalah: (1) layanan kepada anak yang meliputi perawatan, asuhan, pendidikan, kesehatan, dan gizi; (2) layanan kepada orang tua yang meliputi *parenting*

education, penyuluhan sosial tentang usaha kesejahteraan anak antara lain mengenai tumbuh kembang anak dan pendidikan prasekolah; (3) Layanan kepada masyarakat yang meliputi sosialisasi tentang pentingnya pengasuhan, perawatan, pendidikan anak, sosialisasi anak balita, dan pentingnya TPA serta memberikan fasilitas penelitian, magang/*job training* bagi mahasiswa, perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya.

e. Satuan PAUD Sejenis (Pos PAUD dan Bina Keluarga Balita)

Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah bentuk-bentuk Satuan PAUD yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pelayanan Anak Kristen, Bina Iman Anak, atau layanan terkait lainnya.

Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB). Pos PAUD diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pada prinsipnya, Pos PAUD dibentuk atas kesepakatan masyarakat dan dikelola berdasarkan azas gotong-royong, kerelaan, dan kebersamaan.

Salah satu layanan di Posyandu adalah Bina Keluarga Balita (BKB). BKB merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua dan anggota keluarga lainnya tentang bagaimana melakukan pembinaan tumbuh kembang anak balita secara optimal, serta pemantauannya. BKB juga merupakan wahana bagi orang tua dan anggota keluarganya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan dan pendidikan bagi anak-anaknya.

Tujuan program BKB secara umum adalah pemberdayaan keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang balita sebagai calon-calon SDM yang berkualitas, kompetitif dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara khusus tujuannya adalah: (a) meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang pentingnya pembinaan tumbuh kembang balita; (b) meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam

pembinaan tumbuh kembang balita; (c) meningkatkan kualitas para pengelola, pelaksana, kader dalam penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang balita; dan (d) mengupayakan tercapainya tumbuh kembang balita secara optimal melalui kegiatan interaksi orangtua dan anak.

Tabel 2.1
Jumlah Lembaga PAUD Tahun 2011/2012

NO	PROVINSI	JUMLAH LEMBAGA					
		TK	KB	TPA	SPS	RA/BA	TOTAL
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1,268	993	107	173	280	2,821
2	SUMATERA UTARA	1,565	3,734	149	1,615	1,557	8,620
3	SUMATERA BARAT	1,764	1,652	161	568	423	4,568
4	RIAU	1,270	1,277	136	245	382	3,310
5	JAMBI	229	800	26	101	244	1,400
6	SUMATERA SELATAN	876	1,414	50	203	402	2,945
7	BENGKULU	510	835	169	255	89	1,858
8	LAMPUNG	1,929	1,662	51	326	527	4,495
9	BANGKA BELITUNG	279	374	42	45	47	787
10	KEPULAUAN RIAU	455	349	20	69	139	1,032
11	DKI JAKARTA	577	356	13	1,221	992	3,159
12	JAWA BARAT	3,681	7,421	145	3,379	5,477	20,103
13	JAWA TENGAH	13,258	6,920	359	2,391	4,362	27,290
14	DI YOGYAKARTA	2,074	1,268	228	1,559	188	5,317
15	JAWA TIMUR	16,036	11,393	295	3,399	6,305	37,428
16	BANTEN	928	1,500	33	481	1,169	4,111
17	BALI	1,307	805	62	449	87	2,710
18	NUSA TENGGARA BARAT	1,394	1,599	64	388	465	3,910
19	NUSA TENGGARA TIMUR	949	1,761	48	211	115	3,084
20	KALIMANTAN BARAT	389	806	42	95	142	1,474
21	KALIMANTAN TENGAH	1,036	353	60	134	157	1,740
22	KALIMANTAN SELATAN	2,078	1,055	129	153	231	3,646
23	KALIMANTAN TIMUR	1,012	873	41	94	131	2,151
24	SULAWESI UTARA	1,194	638	25	198	134	2,189
25	SULAWESI TENGAH	932	759	20	132	168	2,011
26	SULAWESI SELATAN	3,237	1,891	76	333	674	6,211
27	SULAWESI TENGGARA	1,143	291	21	27	171	1,653
28	GORONTALO	626	811	31	159	43	1,670
29	SULAWESI BARAT	342	484	25	35	156	1,042
30	MALUKU	272	550	33	180	52	1,087

NO	PROVINSI	JUMLAH LEMBAGA					
		TK	KB	TPA	SPS	RA/BA	TOTAL
31	MALUKU UTARA	163	274	3	29	62	531
32	PAPUA BARAT	201	268	9	29	39	546
33	PAPUA	274	296	26	263	25	884
	INDONESIA	63,248	55,462	2,699	18,939	25,435	165,783

Sumber: PDSP Kemdikbud dan Kemenag RI 2012

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk 0- 6 Tahun Yang Terlayani Tahun 2011/2012

NO	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (PESERTA DIDIK)					
		JUMLAH PENDUDUK 0-6 TAHUN	TK+TKLB+ RA/BA	TPA	KB	SPS	TOTAL
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	653,600	84,927	3,040	38,807	49,394	176,168
2	SUMATERA UTARA	2,111,000	198,617	8,559	121,641	275,760	604,577
3	SUMATERA BARAT	601,700	103,165	4,255	41,449	56,831	205,700
4	RIAU	854,100	113,931	3,885	34,953	87,454	240,223
5	JAMBI	508,300	49,114	1,906	45,414	64,339	160,773
6	SUMATERA SELATAN	915,000	74,252	1,064	48,932	142,586	266,834
7	BENGKULU	201,200	34,074	3,043	22,039	19,334	78,490
8	LAMPUNG	1,024,500	118,520	1,289	47,914	138,357	306,080
9	BANGKA BELITUNG	157,600	26,264	1,088	22,101	25,608	75,061
10	KEPULAUAN RIAU	138,700	28,732	823	10,553	24,279	64,387
11	DKI JAKARTA	989,800	140,582	685	112,103	62,333	315,703
12	JAWA BARAT	5,677,400	469,834	7,370	434,448	852,125	1,763,777
13	JAWA TENGAH	3,204,700	780,400	7,776	215,342	248,850	1,252,368
14	DI YOGYAKARTA	302,700	83,724	5,368	37,286	50,935	177,313
15	JAWA TIMUR	4,044,699	1,179,751	6,470	287,760	760,088	2,234,069
16	BANTEN	1,418,000	174,523	789	56,042	217,406	448,760
17	BALI	411,500	70,412	1,125	29,847	64,115	165,499
18	NUSA TENGGARA BARAT	505,400	72,925	2,336	47,917	45,851	169,029
19	NUSA TENGGARA TIMUR	892,700	67,057	864	39,856	112,594	220,371
20	KALIMANTAN BARAT	708,769	42,985	1,284	34,972	82,395	161,636
21	KALIMANTAN TENGAH	240,331	45,847	925	21,151	18,090	86,013
22	KALIMANTAN SELATAN	539,500	105,869	2,403	27,312	24,010	159,594
23	KALIMANTAN TIMUR	519,000	63,044	937	33,006	18,566	115,553
24	SULAWESI UTARA	316,700	48,462	554	26,320	16,020	91,356
25	SULAWESI TENGAH	479,200	62,004	1,251	47,636	47,970	158,861
26	SULAWESI SELATAN	926,300	155,273	1,534	77,168	29,469	263,444
27	SULAWESI TENGGARA	315,300	75,186	756	20,193	11,821	107,956
28	GORONTALO	150,700	26,334	642	25,317	8,393	60,686

NO	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (PESERTA DIDIK)					
		JUMLAH	TK+TKLB+	TPA	KB	SPS	TOTAL
29	SULAWESI BARAT	185,300	25,599	442	12,399	15,720	54,160
30	MALUKU	268,800	18,905	1,046	12,629	24,926	57,506
31	MALUKU UTARA	149,800	17,539	185	10,050	8,395	36,169
32	PAPUA BARAT	160,900	17,646	291	8,409	7,844	34,190
33	PAPUA	586,900	35,902	1,498	20,320	48,481	106,201
	INDONESIA	30,160,099	4,611,399	75,483	2,071,286	3,660,339	10,418,507

umber: PDSP Kemdikbud 2012

2. Kinerja Pelaksanaan Program

Target Pendidikan Untuk Semua hasil kesepakatan Dakar bahwa pada tahun 2015 sekitar 75% anak usia 0-6 tahun memperoleh akses layanan PAUD, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam akses program PAUD sejak tahun 2000. Peserta didik PAUD telah mengalami percepatan angka partisipasi mendekati target nasional. APK PAUD Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar
Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) Tahun 2010 – 2012

No	Provinsi	APK PAUD		
		2010	2011	2012
1	Nanggroe Aceh Darussalam	83.02	26.63	27.11
2	Sumatera Utara	30.20	24.13	25.79
3	Sumatera Barat	66.59	31.26	34.27
4	RIAU	48.07	24.97	26.83
5	Jambi	51.52	24.20	31.12
6	Sumatera Selatan	47.03	25.42	32.03
7	Bengkulu	59.46	36.43	47.75
8	Lampung	48.14	27.79	44.69
9	Bangka Belitung	92.88	54.63	47.04
10	Kepulauan Riau	78.37	42.84	43.16
11	DKI Jakarta	49.31	29.66	29.15
12	Jawa Barat	39.84	26.80	29.24
13	Jawa Tengah	68.41	38.29	33.77
14	DI Yogyakarta	109.00	55.11	61.03
15	Jawa Timur	89.62	50.24	48.43

No	Provinsi	APK PAUD		
		2010	2011	2012
16	Banten	32.00	26.70	29.53
17	Bali	51.06	36.25	42.47
18	Nusa Tenggara Barat	59.61	30.45	32.33
19	Nusa Tenggara Timur	27.41	19.38	24.58
20	Kalimantan Barat	33.00	19.14	48.04
21	Kalimantan Tengah	62.36	35.00	35.26
22	Kalimantan Selatan	43.35	27.10	81.24
23	Kalimantan Timur	36.46	18.59	26.25
24	Sulawesi Utara	53.59	25.79	29.90
25	Sulawesi Tengah	42.85	25.45	34.22
26	Sulawesi Selatan	48.78	25.17	26.65
27	Sulawesi Tenggara	67.39	25.66	34.03
28	Gorontalo	61.43	25.10	40.39
29	Sulawesi Barat	47.81	21.97	28.68
30	Maluku	30.55	11.78	23.50
31	Maluku Utara	53.96	19.55	27.11
32	Papua Barat	31.07	14.53	21.25
33	Papua	41.65	17.39	18.72
	Indonesia	53.70	31.03	34.54

Sumber: PDSP Kemdikbud (Berbagai tahun)

3. Analisis Pelaksanaan Program

Berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini sampai Tahun 2011 maka dapat dilakukan analisis dan identifikasi kebutuhan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Analisis SWOT dengan membagi pada dua besaran analisis yaitu analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman).

Analisis lingkungan internal merupakan upaya untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal. Sedangkan analisis eksternal merupakan upaya untuk memahami peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal sehingga tingkat keberhasilannya dapat diprediksi secara tepat.

Kondisi dan keberhasilan pelaksanaan program-program pendidikan anak usia dini, tidak dapat dipisahkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Berbagai masalah yang harus dihadapi dalam pelaksanaan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain:

1. Pelayanan PAUD selama ini banyak dilakukan di daerah perkotaan. Untuk masyarakat pedesaan, program PAUD masih kurang, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD dan terkesan bahwa PAUD masih merupakan sesuatu yang mewah dan mahal;
2. Kebutuhan layanan PAUD belum disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, tantangan, dan potensi masyarakat maupun daerah;
3. Lembaga penyelenggara PAUD masih terbatas, khususnya di daerah pedesaan;
4. Tenaga pengelola PAUD masih perlu ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya;
5. Sarana dan prasarana pendidikan PAUD masih kurang baik di dalam maupun di luar ruangan;
6. Data dan informasi PAUD masih belum tersusun secara baik dan akurat sehingga sering terjadi perbedaan data. Keadaan ini membawa implikasi terhadap penyusunan perencanaan program dan target PAUD yang kurang mantap karena belum didasarkan pada data yang lengkap dan akurat;
7. Pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi logis otonomi daerah menyebabkan perlunya koordinasi dan konsolidasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD.

Secara internal, kekuatan penyelenggaraan PAUD ditentukan oleh hal sebagai berikut:

1. Komitmen pemerintah dan dukungan legislatif sangat baik dalam penyelenggaraan PAUD. Hal ini terkait dengan adanya target dan indikator keberhasilan Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam *Millenium Development Goals*(MDGs);

2. Adanya semangat voluntarisme dan partisipasi masyarakat sebagai tutor atau pengajar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Adanya bantuan dana (*blockgrant*) kepada lembaga-lembaga penyelenggara;
4. Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi wanita, perguruan tinggi, dan lain-lain;
5. Dukungan anggaran yang makin baik dan semakin bertambah sehingga menjangkau jumlah sasaran program Pendidikan Anak Usia Dini yang besar dan bervariasi.

Sementara itu, berbagai kelemahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain:

1. Jumlah anak usia dini yang masih cukup besar yang harus dilayani tidak sebanding dengan ketersediaan dana, sarana dan prasarana serta tenaga pendidik PAUD yang tersedia;
2. Data/infomasi PAUD yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga menjadi kendala dalam perencanaan program baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
3. Program layanan PAUD pada umumnya baru memberikan layanan bagi anak usia 4 tahun ke atas dan sebagian besar lembaga layanan PAUD tersebut berada di daerah perkotaan;
4. Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD pada umumnya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sebagian dari mereka bekerja secara sukarela (*volunteer*);
5. Program Pelayanan Perawatan dan Pendidikan Anak Usia Dini, belum dilaksanakan secara holistik dan integratif (terpadu);
6. Koordinasi antar lembaga, organisasi yang terkait dengan pelayanan anak usia dini, belum optimal;
7. Sosialisasi, promosi dan edukasi tentang pentingnya perawatan dan pendidikan anak usia dini belum merata, terutama bagi keluarga, orang tua dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sulit.

Analisis lingkungan eksternal dapat dirumuskan beberapa peluang dan tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini. Peluang dan tantangan itu adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan anggaran dan sumber daya pendukung lainnya sebagai payung Pendidikan Anak Usia Dini;
2. PAUD percontohan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dapat dijadikan tempat pelatihan/magang bagi lembaga PAUD lain belum memenuhi standar;
3. Pengembangan model inovatif yang dilakukan melalui pemberian bantuan dalam konteks Indonesia perlu dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi pendidikan di provinsi;
4. Perluasan pengembangan PAUD Profesional. Peningkatan kualitas pendidikan melalui *Professional Development System (PDS)* dalam pendidikan dan pelatihan bagi pendidik/guru PAUD;
5. Adanya kerjasama antara pemerintah dengan berbagai organisasi wanita dan kemasyarakatan dalam upaya percepatan pelayanan PAUD.

Beberapa tantangan yang harus dicermati dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagian besar TK hingga saat ini banyak dikelola oleh swasta, hal ini menunjukkan bahwa banyak orangtua yang dengan sengaja memasukkan anaknya (kelompok usia PAUD) ke kelas 1 SD dengan tujuan memangkas biaya pendidikan;
2. Jumlah pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D4 masih sangat terbatas. Latar belakang pendidikan ini sangat mempengaruhi remunerasi yang ditetapkan oleh pemilik lembaga (bagi TK/PAUD swasta) sehingga hal ini akan mempengaruhi kualitas program PAUD yang diselenggarakan di daerah tersebut;
3. Masih belum banyak masyarakat mengetahui tentang pentingnya perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi keluarga, orangtua dan masyarakat di daerah tertentu;
4. Masih terbatasnya perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

B Hasil Pelaksanaan Program

1. Kebijakan Nasional

Target Deklarasi Dakar 2015 adalah memperbaiki secara menyeluruh program perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. Target yang ditetapkan provinsi pada akhir 2015 sebanyak 70% anak usia dini terlayani perawatan dan pendidikannya.

Dalam upaya mencapai target provinsi tahun 2015, yaitu 70% anak usia dini memperoleh layanan perawatan dan pendidikan, telah ditempuh upaya mengintegrasikan program pelayanan pendidikan dengan program perawatan bagi anak usia dini, melalui:

- a. Mengoptimalkan lembaga layanan perawatan yang sudah ada, dengan memasukkan program layanan pendidikan bagi anak usia dini;
- b. Mengoptimalkan lembaga layanan pendidikan anak usia dini yang sudah ada, dengan memasukkan program layanan perawatan bagi anak usia dini;
- c. Mengembangkan model layanan pendidikan yang terintegrasi dengan layanan perawatan, seperti Posyandu terintegrasi PAUD dan sejenisnya;
- d. Mengembangkan berbagai program perintisan PAUD, yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah (kearifan budaya lokal).

2. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan

Berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan mutu layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini, telah dilakukan program sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang telah ada untuk mendukung perluasan akses layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini;
- b. Mengembangkan program PAUD bagi daerah yang belum terjangkau layanan PAUD, melalui perintisan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan pelayanan PAUD terintegrasi dengan Posyandu dan Bina Keluarga Balita dan pengembangan model PAUD TK-Kecil, TK Alternatif, serta bentuk lain yang sesuai kebutuhan dan tuntutan

masyarakat;

- c. Memberdayakan peranserta masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program perawatan dan pendidikan anak usia dini;
- d. Menggali berbagai sumber pendanaan baik dari pemerintah pusat/daerah, masyarakat, komunitas bisnis dalam rangka mendukung tercapainya penyebaran dan perluasan layanan PAUD secara merata;
- e. Menyediakan dukungan dan bantuan bagi institusi dan organisasi terkait dengan layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan akses layanan PAUD;
- f. Mengembangkan berbagai institusi layanan perawatan dan PAUD dari, oleh dan untuk masyarakat;
- g. Mengembangkan standar, acuan dan kurikulum penyelenggaraan program layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini;
- h. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- i. Menyediakan sarana dan prasarana layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini;
- j. Menyediakan dukungan dan bantuan bagi lembaga yang mengembangkan program layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini;
- k. Mengendalikan mutu layanan program perawatan dan pendidikan anak usia dini secara berjenjang dan berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi;
- l. Mengembangkan kebijakan program layanan pendidikan anak usia dini yang terpadu dan terintegrasi;
- m. Mendata dan membuat peta program layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup data lembaga dan sasaran layanan PAUD;
- n. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi mitra antara lain dengan Forum PAUD, Konsorsium PAUD, Organisasi Wanita, Perguruan Tinggi, HIMPAUDI, IGTKI-PGRI,

GOPTKI, IGRA, BPTKI dan lembaga mitra PAUD lainnya;

- o. Menyebarluaskan informasi akan pentingnya perawatan dan pendidikan anak usia dini melalui sosialisasi, promosi, dan edukasi baik melalui media cetak dan elektronik;
- p. Memperkuat kapasitas kelembagaan perawatan dan pendidikan anak usia dini melalui pelayanan secara terpadu;
- q. Meningkatkan manajemen dan tata kelola layanan PAUD di tingkat;
- r. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD.

3. Sasaran dan Target Capaian

Sasaran dan target capaian program Pendidikan Anak Usia Dini adalah:

- a. Meningkatnya angka partisipasi anak usia 0-6 tahun yang memperoleh layanan pendidikan mencapai 75% pada tahun 2015;
- b. Meningkatnya mutu layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar;
- c. Meningkatnya jumlah lembaga layanan perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini;
- d. Meningkatnya jumlah tenaga layanan bagi anak usia dini;
- e. Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam berbagai program layanan perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini.

4. Program Kegiatan

Program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target nasional PAUD adalah sebagai berikut:

- a. Membangun/memanfaatkan berbagai sarana/prasarana/fasilitas yang ada di masyarakat untuk berbagai kegiatan pendidikan atau perawatan bagi anak usia dini;
- b. Mengembangkan dan merintis berbagai model layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, TK Kecil, TK Alternatif, Posyandu terintegrasi PAUD, BKB terintegrasi PAUD dan sejenisnya) yang sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat;

- c. Mengembangkan Pusat Rujukan Pelayanan Perawatan dan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap provinsi;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perawatan dan pendidikan anak usia dini, melalui sosialisasi dan advokasi, bimbingan dan penyuluhan, dan pelibatan secara langsung masyarakat dalam pengelolaan berbagai program layanan pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini;
- e. Menggali berbagai sumber dana dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan dunia usaha, guna mendukung pemerataan dan perluasan layanan perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini;
- f. Memberikan dukungan/bantuan kepada lembaga, organisasi lembaga perawatan dan pendidikan anak usia dini guna peningkatan akses layanan perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini;
- g. Menumbuhkan berbagai lembaga layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini yang berbasis masyarakat (dari, oleh dan untuk masyarakat);
- h. Menyusun dan mengembangkan berbagai standar seperti tenaga, sarana, prasarana, kurikulum, dsb di bidang pendidikan anak usia dini;
- i. Meningkatkan mutu (kualifikasi dan kompetensi) tenaga pendidik, pembina dan pengelola program perawatan dan pendidikan anak usia dini melalui pendidikan dan pelatihan;
- j. Memberikan dukungan/bantuan kepada lembaga-lembaga perawatan dan pendidikan anak usia dini dalam rangka peningkatan mutu dan kapasitas kelembagaan;
- k. Melakukan pengembangan, evaluasi, dan pengadaan berbagai bahan belajar, pedoman, kurikulum dan sarana/prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan program layanan perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini;
- l. Mengembangkan kebijakan untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain terkait, seperti perguruan tinggi, kementerian teknis, dan organisasi lainnya, dalam rangka menjamin terselenggaranya program layanan bagi anak usia dini secara terpadu dan terintegrasi (pendidikan, perawatan, kesehatan dan gizi);

- m. Memberikan bantuan teknis, bimbingan dan motivasi khususnya kepada lembaga-lembaga perawatan dan pendidikan anak usia dini dalam rangka peningkatan mutu layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini;
- n. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini;
- o. Mengembangkan jalinan kerjasama/kemitraan dan koordinasi dengan berbagai lembaga, organisasi dan sektor yang terkait, antara lain melalui pembentukan konsorsium, Forum dan Organisasi Profesi Pendidik PAUD;
- p. Melakukan pendataan dan konsolidasi terhadap *target group* dan/atau sasaran program layanan perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini;
- q. Mengembangkan dan menyebarluaskan bahan komunikasi, informasi dan edukasi tentang perawatan dan pendidikan anak usia dini melalui media cetak dan elektronik;
- r. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan studi dalam rangka peningkatan mutu dan penyempurnaan kebijakan di bidang program layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini;
- s. Memperbaiki dan meningkatkan mutu manajemen pengelolaan perawatan dan pendidikan anak usia dini baik di tingkat pusat maupun daerah.

BAB III

PENDIDIKAN DASAR

A. Analisis Situasi dan Kondisi

1. Mekanisme Pelaksanaan Program

Program pendidikan dasar yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi dalam Renstra Kemdiknas 2010 - 2014 dan laporan PUS 2011, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Melanjutkan pembangunan unit gedung baru (UGB) dan ruang kelas baru (RKB) bagi daerah yang membutuhkan, khususnya di daerah pedesaan, terpencil dan terisolasi. Dalam pembangunan UGB dan RKB, pemetaan sekolah (*school mapping*) akan digunakan sebagai masukan dalam melakukan perencanaan agar program lebih tepat sasaran; serta melanjutkan usaha penggabungan (*regrouping*) sekolah yang berdekatan, terutama yang masih memiliki kapasitas atau kekurangan siswa;
- b. Meningkatkan pemberian bantuan dan pemberdayaan sekolah swasta dalam pengadaan ruang kelas baru (RKB), buku dan alat pelajaran, dan tenaga kependidikan, serta bantuan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan kompetensi;
- c. Memberdayakan dan meningkatkan mutu SMP Terbuka yang telah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu akan dilakukan konsolidasi dan perbaikan manajemen kelembagaan, peningkatan kualitas guru bina dan pamong, perbaikan mutu buku modul, perbaikan proses belajar mengajar, dan peningkatan dukungan dan kerjasama dengan masyarakat;
- d. Meningkatkan pelaksanaan program Paket A dan Paket B dalam menangani anak usia pendidikan dasar yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti pendidikan melalui sistem persekolahan, putus sekolah, dan/atau tamat tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, serta mendorong tumbuhnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu satuan pendidikan untuk menyelenggarakan program Paket A dan Paket B;

- e. Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan dasar melalui pondok pesantren Salafiah, baik *madrasah Diniyah Ula* (setara SD) atau *madrasah Diniyah Wustha* (setara SMP), melalui penambahan 3 (tiga) mata pelajaran pokok dalam kegiatan pembelajaran, yaitu: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
- f. Melakukan konsolidasi SD Kecil, SD Satu Guru, SMP Kecil dan SMP Terpadu, agar lembaga pendidikan ini lebih dapat diberdayakan dan ditingkatkan kualitas pelayanan pendidikannya bagi warga masyarakat yang membutuhkan;
- g. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah 7-15 tahun yang merupakan target-target khusus pendidikan dasar 9 tahun, seperti anak-anak yang berasal dari daerah terpencil, anak yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental, anak-anak daerah kumuh, anak-anak jalanan, dan kelompok anak-anak lain yang masih belum terjangkau pelayanan pendidikan dasar;
- h. Memberikan muatan pendidikan keterampilan kepada peserta didik pendidikan dasar, sehingga menguasai satu jenis atau lebih keterampilan yang dapat dijadikan bekal hidup dan menghadapi kehidupan di masyarakat;
- i. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar melalui pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan lembaga diklat profesional;
- j. Melanjutkan upaya peningkatan kualifikasi guru SD/MI dan SMP/MTs, serta sertifikasi guru yang *mismatch*, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pendidikan S1. Peningkatan kualifikasi ini dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi lokal yang memenuhi persyaratan kualitas dan melalui program jarak jauh;
- k. Melanjutkan pengadaan tutor Paket A dan Paket B untuk mengatasi kekurangan tenaga tutor di daerah-daerah yang membutuhkan. Selain itu, memberikan kesempatan kepada guru-guru di sekolah formal yang kekurangan jam mengajar di sekolahnya untuk menjadi tutor di program Paket;
- l. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan nonformal melalui pelatihan dan workshop dalam rangka meningkatkan kualitas terutama

dalam penerapan pendekatan partisipatoris dan andragogi;

- m. Melakukan rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak, sehingga mereka dapat memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya;
- n. Menciptakan iklim dan suasana kompetitif dan koperatif antar sekolah dalam memajukan dan meningkatkan kualitas siswa dan sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- o. Memperbaiki sistem informasi manajemen untuk mampu menyediakan data yang akurat dan selalu aktual sebagai dasar bagi perencanaan dan pelayanan yang lebih baik;
- p. Peningkatan upaya pengurangan siswa putus sekolah, tidak melanjutkan, antara lain melalui program beasiswa bagi siswa SD dan SMP yang kurang mampu, dan pemberian dana bantuan operasional bagi sekolah-sekolah yang berada di kantong-kantong masyarakat yang mengalami kesulitan dalam akses pendidikan;
- q. Peningkatan usaha mengurangi siswa mengulang kelas, khususnya di tingkat SD/MI. Upaya ini akan dilakukan dengan tidak mengenyampingkan mutu pendidikan;
- r. Peningkatan program konsolidasi dan revitalisasi sekolah, khususnya sekolah dasar yang berdekatan dengan jumlah siswa yang masih sedikit. Upaya ini akan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya pendidikan sehingga lebih efisien dan efektif;
- s. Peningkatan kapasitas dan kompetensi manajemen pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peningkatan usaha mendorong pengembangan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, dan Komite Sekolah di tingkat SD/MI dan SMP/MTs, sebagai institusi yang berfungsi memberi pertimbangan kebijakan pendidikan/sekolah, dukungan pelaksanaan dan manajemen pendidikan/sekolah, pengawasan dan penilaian kinerja pendidikan/sekolah, serta mediasi antara masyarakat pendidikan dengan pengelola dan penyelenggara satuan pendidikan.

2. Kinerja Pelaksanaan Program Pendidikan Dasar

Target pemerintah tahun 2015 adalah tercapainya APK SD/MI/Paket A 119,1%; APM SD/MI/Paket A 96%, dan APK SMP/MTS/Paket B 110%.

Sampai dengan tahun 2011/2012, APK SD/MI/Paket A 115,43%, APM SD/MI 95,5% dan APK SMP/MTS/Paket B 99,47%. Target Dakar juga akan berpengaruh pengurangan angka mengulang dan angka putus sekolah SD di tahun 2011 dan SMP di tahun 2011.

Tabel 3.1
Jumlah Lembaga Pendidikan Dasar Tahun 2010-2011

NO	PROVINSI	2010/2011				2011/2012			
		SD	MI	SMP	MTS	SD	MI	SMP	MTS
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,339	565	881	341	3,339	575	930	361
2	SUMATERA UTARA	9,351	725	2,208	872	9,343	744	2,258	891
3	SUMATERA BARAT	4,127	141	689	379	4,131	123	742	376
4	RIAU	3,392	376	868	550	3,394	380	946	558
5	JAMBI	2,354	254	566	321	2,363	263	598	343
6	SUMATERA SELATAN	4,521	479	1,139	419	4,539	474	1,161	398
7	BENGKULU	1,329	118	365	77	1,329	126	386	78
8	LAMPUNG	4,557	740	1,208	638	4,539	723	1,215	616
9	BANGKA BELITUNG	790	30	179	38	777	31	189	40
10	KEPULAUAN RIAU	818	48	272	57	838	52	268	58
11	DKI JAKARTA	2,957	463	1,030	230	3,112	469	943	234
12	JAWA BARAT	19,759	3,444	3,440	2,437	19,874	3,560	4,106	2,503
13	JAWA TENGAH	19,739	3,745	3,032	1,508	19,331	3808	3,182	1,527
14	DI YOGYAKARTA	1,924	156	451	88	1,907	159	477	89
15	JAWA TIMUR	19,923	6,713	3,605	2,902	19,701	6886	4,080	3,081
16	BANTEN	4,475	878	1,036	754	4,501	921	1,166	799
17	BALI	2,429	53	366	29	2,411	54	397	28
18	NUSA TENGGARA BARAT	3,041	692	558	678	3,058	779	700	739
19	NUSA TENGGARA TIMUR	4,551	149	903	64	4,721	152	1,193	64
20	KALIMANTAN BARAT	4,087	347	1,004	254	4,141	387	1,078	265
21	KALIMANTAN TENGAH	2,495	269	545	134	2,471	269	673	149
22	KALIMANTAN SELATAN	2,910	504	535	318	2,869	415	572	245
23	KALIMANTAN TIMUR	2,212	126	640	131	2,221	130	707	156
24	SULAWESI UTARA	2,205	71	640	54	2,205	80	670	55
25	SULAWESI TENGAH	2,750	176	481	256	2,729	188	699	259
26	SULAWESI SELATAN	6,301	626	1,225	613	6,283	646	1,418	668
27	SULAWESI TENGGARA	2,229	143	533	126	2,262	130	643	174
28	GORONTALO	865	83	246	64	900	90	304	67
29	SULAWESI BARAT	1,269	120	236	188	1,287	150	285	135
30	MALUKU	1,706	121	522	92	1,713	125	546	101

NO	PROVINSI	2010/2011				2011/2012			
		SD	MI	SMP	MTS	SD	MI	SMP	MTS
31	MALUKU UTARA	1,229	107	262	123	1,249	110	393	134
32	PAPUA BARAT	930	34	178	26	972	40	221	27
33	PAPUA	2,240	31	447	26	2,316	32	522	26
	INDONESIA	146,804	22,527	30,290	14,787	146,826	23,071	33,668	15,244

Sumber: PDSP Kemdikbud 2011 & 2012

Tabel 3.2
APM dan APK SD/MI/Paket A Tahun 2010 - 2011

No	Provinsi	SD/MI/Paket A			
		APM (%)		APK (%)	
		2010/2011	2011/2012	2010/2011	2011/2012
1	Nanggroe Aceh Darussalam	89,48	89,54	107,88	106,85
2	Sumatera Utara	94,57	94,61	112,78	112,35
3	Sumatera Barat	97,31	97,34	118,87	118,67
4	RIAU	93,98	94,01	114,35	114,80
5	Jambi	95,57	95,59	116,76	116,30
6	Sumatera Selatan	93,11	93,18	113,12	112,95
7	Bengkulu	97,04	97,18	118,30	119,19
8	Lampung	95,14	95,38	113,53	111,41
9	Bangka Belitung	98,44	98,46	120,76	121,78
10	Kepulauan Riau	97,00	97,47	121,63	126,85
11	DKI Jakarta	97,93	98,01	115,76	113,80
12	Jawa Barat	96,88	96,97	119,06	119,31
13	Jawa Tengah	96,04	96,15	114,93	115,93
14	DI Yogyakarta	97,51	97,52	117,39	119,04
15	Jawa Timur	95,85	95,95	115,66	114,39
16	Banten	96,16	96,22	113,58	112,97
17	Bali	98,24	98,56	119,52	120,37
18	Nusa Tenggara Barat	92,19	92,37	110,29	108,58
19	Nusa Tenggara Timur	93,22	93,45	115,11	117,44
20	Kalimantan Barat	92,52	93,18	111,30	114,03
21	Kalimantan Tengah	96,63	96,83	117,23	118,24
22	Kalimantan Selatan	95,35	95,61	115,56	116,46
23	Kalimantan Timur	97,01	97,27	118,37	120,22
24	Sulawesi Utara	95,15	95,37	115,62	115,36
25	Sulawesi Tengah	95,43	95,25	112,61	114,77
26	Sulawesi Selatan	95,41	95,77	115,15	114,81
27	Sulawesi Tenggara	95,92	96,19	118,42	117,81
28	Gorontalo	93,41	93,73	114,07	113,69

No	Provinsi	SD/MI/Paket A			
		APM (%)		APK (%)	
		2010/2011	2011/2012	2010/2011	2011/2012
29	Sulawesi Barat	90,36	90,63	109,18	109,47
30	Maluku	91,05	91,39	111,09	109,70
31	Maluku Utara	97,45	97,62	121,03	123,22
32	Papua Barat	89,43	89,53	107,58	110,73
33	Papua	90,69	90,89	108,30	113,68
	Indonesia	95,41	95,55	115,33	115,43

Sumber: PDSP Kemdikbud 2011 & 2012

Tabel 3.3
APK SMP/MTs/Paket B Tahun 2010-2011

No	Provinsi	SMP/MTs/Paket B	
		2010/2011	2011/2012
1	Nanggroe Aceh Darussalam	104,79	107,59
2	Sumatera Utara	99,64	102,41
3	Sumatera Barat	109,10	111,22
4	RIAU	104,55	105,38
5	Jambi	101,16	101,25
6	Sumatera Selatan	93,73	93,82
7	Bengkulu	100,19	100,67
8	Lampung	94,59	94,92
9	Bangka Belitung	96,38	98,57
10	Kepulauan Riau	110,79	110,87
11	DKI Jakarta	117,34	117,54
12	Jawa Barat	94,03	94,55
13	Jawa Tengah	99,72	100,43
14	DI Yogyakarta	115,70	118,73
15	Jawa Timur	105,65	107,18
16	Banten	94,31	95,66
17	Bali	106,08	109,99
18	Nusa Tenggara Barat	101,85	103,84
19	Nusa Tenggara Timur	80,03	82,74
20	Kalimantan Barat	84,63	86,94
21	Kalimantan Tengah	83,97	87,34
22	Kalimantan Selatan	87,28	89,43
23	Kalimantan Timur	95,82	97,59
24	Sulawesi Utara	99,21	99,63
25	Sulawesi Tengah	90,41	90,80

No	Provinsi	SMP/MTS/Paket B	
		2010/2011	2011/2012
26	Sulawesi Selatan	97,55	98,96
27	Sulawesi Tenggara	97,58	100,57
28	Gorontalo	90,64	90,87
29	Sulawesi Barat	92,23	94,36
30	Maluku	97,76	102,40
31	Maluku Utara	97,15	98,06
32	Papua Barat	79,72	80,52
33	Papua	80,96	81,56
	Indonesia	98,20	99,47

Sumber: PDSP Kemdikbud

Tabel 3.4
Perkembangan Siswa SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2011 - 2012

No	Provinsi	2011				2012			
		SD/MI		SMP/MTS		SD/MI		SMP/MTS	
		Siswa	Paket A	Siswa	Paket B	Siswa	Paket A	Siswa	Paket B
1	NAD	638,639	4,752	282,675	1,838	634,743	2,373	283,926	8,136
2	Sumatera Utara	1,934,855	5,061	803,242	10,935	1,929,520	2,540	788,244	2,773
3	Sumatera Barat	697,876	5,500	280,482	2,022	699,197	2,803	278,793	4,809
4	RIAU	815,986	4,176	306,123	12,553	821,188	1,954	295,197	6,603
5	Jambi	431,993	4,799	173,007	5,023	432,597	2,371	165,662	2,434
6	Sumatera Selatan	1,006,002	3,884	399,245	33,841	1,006,069	2,082	382,826	10,529
7	Bengkulu	240,364	3,067	96,622	3,395	243,633	1,563	97,321	5,172
8	Lampung	1,022,620	3,559	434,925	29,664	1,005,278	1,541	416,552	10,781
9	Bangka Belitung	156,206	2,478	52,176	140	160,335	1,467	52,597	3,855
10	Kepulauan Riau	191,636	971	65,186	1,406	202,865	485	66,786	2,079
11	DKI Jakarta	944,064	2,778	439,466	18,613	925,096	1,539	398,424	9,550
12	Jawa Barat	5,406,392	14,494	2,254,985	87,360	5,425,986	5,174	2,176,078	35,098
13	Jawa Tengah	3,746,306	10,201	1,651,404	33,260	3,783,900	4,531	1,707,258	23,502
14	DI Yogyakarta	313,517	757	153,830	3,365	318,302	323	147,976	8,563
15	Jawa Timur	4,072,613	15,027	1,813,784	35,638	4,030,391	11,180	1,824,684	30,430
16	Banten	1,398,196	7,378	541,856	4,020	1,394,113	3,488	538,105	13,243
17	Bali	435,797	724	181,317	1,487	439,150	373	182,779	5,510
18	NNTB	627,294	3,831	272,453	11,382	619,459	1,757	258,067	5,759
19	NTT	851,597	4,606	263,502	140	871,036	2,302	272,461	1,015
20	Kalimantan Barat	680,267	3,941	222,858	6,283	698,672	2,107	221,963	14,365
21	Kalimantan Tengah	329,196	4,325	109,679	5,887	333,922	2,385	118,064	3,422
22	Kalimantan Selatan	471,104	4,444	166,934	1,203	476,881	2,240	175,196	5,173

No	Provinsi	2011				2012			
		SD/MI		SMP/MTS		SD/MI		SMP/MTS	
		Siswa	Paket A	Siswa	Paket B	Siswa	Paket A	Siswa	Paket B
23	Kalimantan Timur	476,107	7,858	178,254	3,187	487,497	3,931	178,313	4,033
24	Sulawesi Utara	291,423	3,621	122,638	11,092	292,410	1,906	118,752	1,637
25	Sulawesi Tengah	396,876	5,894	147,985	10,923	406,544	3,849	147,450	5,216
26	Sulawesi Selatan	1,126,285	7,720	462,036	16,036	1,125,925	4,435	452,238	14,084
27	Sulawesi Tenggara	366,915	6,146	138,390	1,609	367,899	3,150	141,840	1,833
28	Gorontalo	155,122	3,958	52,681	2,115	155,326	2,044	52,986	3,877
29	Sulawesi Barat	193,944	2,097	65,836	306	195,275	1,243	68,607	4,722
30	Maluku	265,834	5,457	103,004	175	264,985	2,852	103,359	4,837
31	Maluku Utara	185,442	6,343	72,845	2,947	191,975	3,237	74,470	2,496
32	Papua Barat	141,102	1,424	44,722	8,075	145,971	681	48,535	522
33	Papua	400,251	7,615	105,796	8,200	425,342	3,809	113,296	249
	Indonesia	30,411,821	168,886	12,459,938	374,120	23,376,057	68,536	12,348,805	256,307

Sumber: PDSP Kemdikbud 2011&2012

Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B diharapkan menjadi pendidikan alternatif untuk memberikan layanan pendidikan bagi mereka melalui jalur pendidikan nonformal. Meningkatnya jumlah peserta didik pada program pendidikan kesetaraan pada tahun 2011 telah memberikan sumbangan APK Paket A dan B.

Tabel 3.5
Jumlah Warga Belajar Program Paket A dan B Tahun 2010/2011--2011/2012

No	Provinsi	2011		2012	
		SD/MI	SMP/MTS	SD/MI	SMP/MTS
		Paket A	Paket B	Paket A	Paket B
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4,752	1,838	2,373	8,136
2	Sumatera Utara	5,061	10,935	2,540	2,773
3	Sumatera Barat	5,500	2,022	2,803	4,809
4	RIAU	4,176	12,553	1,954	6,603
5	Jambi	4,799	5,023	2,371	2,434
6	Sumatera Selatan	3,884	33,841	2,082	10,529
7	Bengkulu	3,067	3,395	1,563	5,172
8	Lampung	3,559	29,664	1,541	10,781
9	Bangka Belitung	2,478	140	1,467	3,855
10	Kepulauan Riau	971	1,406	485	2,079
11	DKI Jakarta	2,778	18,613	1,539	9,550

No	Provinsi	2011		2012	
		SD/MI	SMP/MTS	SD/MI	SMP/MTS
		Paket A	Paket B	Paket A	Paket B
12	Jawa Barat	14,494	87,360	5,174	35,098
13	Jawa Tengah	10,201	33,260	4,531	23,502
14	DI Yogyakarta	757	3,365	323	8,563
15	Jawa Timur	15,027	35,638	11,180	30,430
16	Banten	7,378	4,020	3,488	13,243
17	Bali	724	1,487	373	5,510
18	Nusa Tenggara Barat	3,831	11,382	1,757	5,759
19	Nusa Tenggara Timur	4,606	140	2,302	1,015
20	Kalimantan Barat	3,941	6,283	2,107	14,365
21	Kalimantan Tengah	4,325	5,887	2,385	3,422
22	Kalimantan Selatan	4,444	1,203	2,240	5,173
23	Kalimantan Timur	7,858	3,187	3,931	4,033
24	Sulawesi Utara	3,621	11,092	1,906	1,637
25	Sulawesi Tengah	5,894	10,923	3,849	5,216
26	Sulawesi Selatan	7,720	16,036	4,435	14,084
27	Sulawesi Tenggara	6,146	1,609	3,150	1,833
28	Gorontalo	3,958	2,115	2,044	3,877
29	Sulawesi Barat	2,097	306	1,243	4,722
30	Maluku	5,457	175	2,852	4,837
31	Maluku Utara	6,343	2,947	3,237	2,496
32	Papua Barat	1,424	8,075	681	522
33	Papua	7,615	8,200	3,809	249
	Indonesia	168,886	374,120	68,536	256,307

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk memastikan pemerataan akses pada kelompok berkebutuhan khusus, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi pendidikan secara bertahap pada tingkat SDLB dan SMPLB. Penyelenggaraan layanan pendidikan berkebutuhan khusus masih didominasi oleh sektor swasta, baik pada SDLB dan SMPLB. Namun, terjadi hambatan dalam pemerataan akses pendidikan berkebutuhan khusus yang meliputi: (1) hambatan biaya bagi keluarga miskin terkait dengan biaya sekolah swasta, (2) jumlah penyelenggara pendidikan luar biasa: di banyak provinsi jumlah rata-rata Sekolah Luar Biasa kurang dari 20 sekolah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah provinsi diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan berkebutuhan khusus dengan membuka kelas inklusi, baik di jenjang SD dan SMP umum. Penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus dengan memodifikasi

infrastruktur sekolah dan guru terlatih menjadi tantangan utama dalam pencapaian target Pendidikan Untuk Semua.

Tabel 3.6
Guru SD dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Tahun 2010 - 2011

No	Provinsi	2010/2011 (%)		2011/2012 (%)	
		SD (S1/D4)	SMP (S1/D4)	SD (S1/D4)	SMP (S1/D4)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	7,646	11,704	14,790	12,866
2	Sumatera Utara	30,964	28,890	38,954	27,285
3	Sumatera Barat	11,621	12,520	19,362	12,328
4	RIAU	9,605	9,974	18,908	10,179
5	Jambi	4,712	6,177	7,517	5,599
6	Sumatera Selatan	11,723	15,151	20,800	14,744
7	Bengkulu	4,235	4,991	6,767	4,861
8	Lampung	11,734	13,006	21,859	13,432
9	Bangka Belitung	1,383	1,700	2,876	1,893
10	Kepulauan Riau	2,883	2,442	4,426	2,394
11	DKI Jakarta	23,968	16,494	27,074	14,872
12	Jawa Barat	87,657	56,832	124,927	51,666
13	Jawa Tengah	55,633	53,680	94,235	52,174
14	DI Yogyakarta	8,451	8,014	12,322	7,953
15	Jawa Timur	107,718	63,544	140,796	63,424
16	Banten	22,900	12,775	32,859	12,473
17	Bali	11,188	8,807	15,750	8,782
18	Nusa Tenggara Barat	7,376	8,263	15,753	7,749
19	Nusa Tenggara Timur	3,930	8,296	5,520	6,519
20	Kalimantan Barat	3,450	6,056	9,048	5,478
21	Kalimantan Tengah	5,683	5,456	9,778	5,355
22	Kalimantan Selatan	7,386	7,017	13,847	7,035
23	Kalimantan Timur	9,472	8,237	13,136	7,703
24	Sulawesi Utara	3,972	5,199	5,978	5,102
25	Sulawesi Tengah	4,256	5,550	7,327	5,549
26	Sulawesi Selatan	22,074	19,472	35,629	19,347
27	Sulawesi Tenggara	3,364	7,171	7,377	6,304
28	Gorontalo	1,768	2,554	3,402	2,527
29	Sulawesi Barat	2,362	2,369	4,694	2,534
30	Maluku	1,457	2,625	2,881	2,631
31	Maluku Utara	699	2,234	1,321	2,221
32	Papua Barat	235	1,247	1,201	1,537
33	Papua	1,322	3,050	2,340	3,453
	Indonesia	492,827	421,497	743,454	407,969

Sumber: PDSP Kemdikbud 2011&2012

3. Analisis Pelaksanaan Program

Berdasarkan kinerja pelaksanaan program pendidikan dasar sampai tahun 2010/2011 maka dapat dilakukan analisis dan identifikasi kebutuhan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis dengan membagi pada dua besaran analisis yaitu analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis lingkungan internal merupakan upaya untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program-program pendidikan. Sedangkan analisis eksternal merupakan upaya untuk memahami peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program-program pendidikan dasar sehingga tingkat keberhasilannya dapat diprediksi secara tepat.

Kondisi dan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Berbagai masalah yang harus dihadapi dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan dasar antara lain:

- a. Penyediaan guru yang berkualitas masih belum terlaksana terutama guru dengan kualifikasi lebih baik. Di daerah pedalaman sangat sulit untuk memanggil guru SD yang berkualitas apalagi membuat mereka nyaman untuk tinggal di pedalaman. Banyak guru terlatih yang berasal dari daerah pedalaman justru cenderung untuk menetap atau pindah ke wilayah perkotaan, setelah menyelesaikan pendidikannya. Selain itu minat guru perempuan untuk mengajar di daerah juga sangat sulit. Kesulitan lainnya adalah merekrut guru lulusan Sarjana atau Diploma untuk mengajar di sekolah pedalaman.
- b. Penyediaan infrastruktur fisik juga belum sepenuhnya terlaksana. Di beberapa daerah pedalaman dengan jumlah populasi sekolah yang sedikit, sejumlah kelas seringkali jarang digunakan. Sebaliknya di beberapa daerah perkotaan yang padat justru kekurangan kelas. Kondisi ini menyebabkan variasi yang signifikan terhadap jumlah siswa per kelas.
- c. Sarana dan prasarana pendidikan dasar di banyak daerah masih terbatas. Fasilitas SMP yang belum disiapkan pada masa lalu, mengakibatkan banyak anak harus putus sekolah dan berhenti hingga di SD. Ketika fasilitas

tersedia saat ini, masalah efisiensi penggunaan fasilitas menjadi masalah baru di daerah pedalaman karena rendahnya populasi usia sekolah.

- d. Angka partisipasi anak berkebutuhan khusus (Luar Biasa) tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap angka partisipasi di sekolah secara umum. Penyelenggaraan layanan pendidikan berkebutuhan khusus masih didominasi oleh sektor swasta dengan 80% jumlah SDLB adalah swasta. Hambatan utama dalam pemerataan akses meliputi: (a) hambatan biaya bagi keluarga miskin terkait dengan biaya sekolah swasta, (b) jumlah penyelenggara pendidikan luar biasa di banyak provinsi rata-rata kurang dari 20 sekolah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan berkebutuhan khusus dengan membuka kelas di SD dan SMP umum.
- e. Hambatan geografis, terutama kepadatan jumlah penduduk dan faktor topografi masih menjadi hambatan utama. Ada gedung SMP dan SMA berada jauh dari pemukiman penduduk yang menyebabkan hambatan akses terkait dengan jarak, biaya transportasi, dan kondisi geografis yang kurang mendukung.
- f. Data dan informasi program wajib belajar 9 tahun belum tersusun secara lengkap dan akurat sehingga sering terjadi perbedaan data. Keadaan ini membawa implikasi terhadap penyusunan perencanaan program dan target pendidikan dasar kurang mantap karena belum didasarkan pada data yang lengkap dan akurat.
- g. Di beberapa daerah realisasi beban biaya pendidikan tidak pasti. Walaupun saat ini telah ada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana implementasi program BOS ini dapat berjalan efektif dan benar-benar mendorong pembebasan biaya pendidikan.
- h. Pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi logis otonomi daerah menyebabkan pengelolaan pendidikan nonformal dan informal cenderung kurang efektif sehingga pelaksanaan program pendidikan wajib belajar 9 tahun sering berjalan kurang optimal.

Secara internal, kekuatan penyelenggaraan program pendidikan dasar ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Komitmen pemerintah dan dukungan legislatif sangat baik dalam penyelenggaraan pendidikan Dasar 9 Tahun. Hal ini terkait dengan adanya

target dan indikator keberhasilan Program Pendidikan Dasar dalam MDGs dan HDI;

- b. Adanya semangat yang tinggi dari para keluarga baik di perkotaan maupun pedesaan untuk menyekolahkan anak-anaknya;
- c. Adanya bantuan dana (*blockgrant*) kepada sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dasar nonformal (Paket A/Paket B) untuk mendukung program pendidikan dasar;
- d. Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita, perguruan tinggi, dan lain-lain, yang sepenuhnya memberikan dukungan bagi keberhasilan program pendidikan dasar.

Sementara itu, berbagai kelemahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut:

- a. Di daerah pedalaman sangat sulit untuk mendapatkan guru SD yang berkualitas untuk tinggal dan mengajar di pedalaman, sehingga perlu dilakukan upaya melalui pemberian insentif dan tunjangan khusus yang memadai;
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai, karena masih banyak gedung sekolah yang rusak dan sarana penunjang lainnya.
- c. Faktor geografis dan kepadatan jumlah penduduk menyebabkan hambatan akses terkait dengan jarak, biaya transportasi, dan kondisi geografis yang kurang mendukung dengan lokasi sekolah..
- d. Data dan informasi pendidikan dasar belum tersusun secara lengkap dan akurat sehingga sering terjadi perbedaan data berpengaruh terhadap penyusunan perencanaan program dan target.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan pengelolaan pendidikan nonformal dan informal cenderung kurang efektif sehingga pelaksanaan program pendidikan wajib belajar 9 tahun sering berjalan kurang optimal.

Analisis lingkungan eksternal dapat dirumuskan beberapa peluang dan tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program-program di bidang pendidikan dasar. Adapun peluang itu adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama telah menjalankan beberapa program untuk menjamin kesinambungan permintaan layanan pendidikan melalui: (a) program rehabilitasi fasilitas SD dan SMP di seluruh Indonesia, (b) program BOS sebagai upaya penghapusan biaya pokok pendidikan, (c) pemberian bantuan pengadaan buku teks sehingga siswa memiliki materi instruksional dan (d) diseminasi hasil evaluasi prestasi belajar siswa SD dan SMP melalui pembentukan komite sekolah dan sistem ujian nasional;
- b. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Agama telah melakukan program perluasan rehabilitasi dan membangun unit sekolah baru (SD/SMP) melalui pemberian dana pemerintah. Pemerintah telah mengadopsi manajemen infrastruktur berbasis komunitas dan model implementasi guna mendukung strategi tata kelola yang lebih luas. Diperkirakan dengan menggunakan model berbasis komunitas 20% anggaran dapat dihemat;
- c. Sejak tahun 2000 pemerintah didukung oleh para donor telah mengembangkan sistem manajemen berbasis hasil di tingkat sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas komite sekolah dalam hal perencanaan dan pengembangan program sekolah jangka menengah, penyusunan target dan monitoring. Program ini didukung oleh beberapa pemberian bantuan keuangan dari pemerintah, seperti halnya program BOS;
- d. Model inovatif juga telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama untuk menjangkau kelompok putus sekolah atau tidak pernah bersekolah yang meliputi: program kesetaraan, optimalisasi fungsi sekolah sebagai pusat pembelajaran masyarakat sepanjang hayat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat penaseleggara pendidikan kesetaraan, perluasan pendidikan kesetaraan pada institusi keagamaan di daerah.

Beberapa tantangan yang harus dicermati dalam pelaksanaan program pendidikan dasar, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pengembangan Model inovatif menjangkau yang tidak terlayani menjamin 5% kelompok sasaran SD dan 20% SMP dapat bersekolah melalui implementasi pendekatan khusus. Sejumlah model pendekatan telah diperkenalkan; meliputi konsolidasi sekolah terpadu (sekolah satu atap) di berbagai jenjang pendidikan. Tantangannya terletak pada pengembangan

sistem manajemen pembelajaran di mana semua mata pelajaran secara efektif terfasilitasi, sebagai bagian dari perencanaan implementasi.

- b. Tantangan PUS sebagian berupa respon dan adaptasi daerah terhadap strategi dan program nasional. Prioritas dalam hal penguatan kelembagaan meliputi: (1) penguatan kepemimpinan di tingkat provinsi terkait dengan proses perencanaan strategi dan monitoring kinerja sekaligus fungsinya dalam melakukan perubahan, (2) penguatan perencanaan operasional di tingkat kabupaten, manajemen sumber daya dan sistem monitoring kinerja dan (3) peningkatan dukungan strategi dan teknis bagi pengelola dan komite sekolah. Diperlukan pendekatan-pendekatan pengembangan kelembagaan yang berbasis '*demand side*', dengan memperhatikan perbedaan yang selama ini ada dalam kapasitas organisasi.
- c. Pemerintah telah berkomitmen untuk memperluas program infrastruktur sekolah melalui pemberian dana pemerintah yang dialokasikan dari dana APBN. Namun tantangannya adalah bagaimana memobilisasi dukungan masyarakat terutama di wilayah yang lebih sulit dan memastikan bahwa komite sekolah membuat alokasi anggaran yang diperlukan untuk perawatan dan perbaikan sekolah.
- d. Pemerintah juga telah berupaya untuk mengurangi hambatan pembiayaan terkait akses pendidikan dengan mengimplementasikan program BOS yang bertujuan untuk membebaskan uang sekolah yang menjadi hambatan utama keluarga miskin untuk memperoleh akses pendidikan. Tantangan program ini terletak pada bagaimana implementasi program BOS dapat berjalan dengan baik dan benar-benar efektif.

B. Hasil Pelaksanaan Program

1. Kebijakan Nasional Layanan

Pada tahun 2015 target Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI dan paket A sebesar 100%. Sampai dengan tahun 2012 APM untuk tingkat SD/MI telah mencapai 95,5%, sedangkan APK SMP/MTs telah mencapai 99,47%.

Kebijakan, strategi dan program penuntasan program Pendidikan Dasar yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Anak Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun), khususnya perempuan, anak miskin dan anak kurang beruntung mendapatkan layanan Pendidikan Dasar yang memenuhi standar minimal mutu pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal;
- b. Perbaikan semua aspek yang mendukung mutu Pendidikan Dasar, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta proses pembelajaran;
- c. Penyediaan pendidik yang berkompeten pada level pendidikan dasar yang merata seluruh kabupaten dan kota, yang meliputi pemenuhan guru SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B;
- d. Penyediaan manajemen SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta Paket A dan Paket B yang merata di seluruh Kabupaten/Kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas dan tenaga administrasi;
- e. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi Pendidikan Dasar;
- f. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB berkualitas yang merata di seluruh Kabupaten/Kota;
- g. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B berkualitas yang merata di seluruh Kabupaten/Kota;
- h. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan Paket B berkualitas yang merata di seluruh Kabupaten/Kota.

2. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan

Berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar dilakukan dalam bentuk program sebagai berikut:

- a. Melaksanakan gerakan penuntasan program pendidikan dasar dengan melibatkan partisipasi semua kekuatan masyarakat, seperti orangtua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industri, dan usahawan, sehingga pelaksanaan penuntasan program ini betul-betul merupakan gerakan sosial (*community-based education*);

- b. Memperkuat program-program esensial yang telah ada untuk meningkatkan jumlah siswa masuk sekolah (*enrollment*), dan mengkaji ulang program kegiatan yang kurang esensial, kemudian melakukan mobilisasi sumberdaya yang mendukung untuk mempertahankan dan meningkatkan program pendidikan dasar;
- c. Memberikan peluang yang lebih besar kepada sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dasar;
- d. Mengupayakan secara efektif target masyarakat yang belum terjangkau (miskin, terpencil dan terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, dalam rangka meningkatkan persamaan hak untuk akses pendidikan dasar;
- e. Implementasi program pendidikan dasar dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan lokal dengan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah kabupaten/kota dengan didukung oleh pemerintah provinsi.

3. Sasaran dan Target Capaian

Laporan akhir tahun 2011 program pendidikan dasar adalah:

- a. Anak Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun), khususnya perempuan, anak miskin dan anak kurang beruntung mendapatkan layanan Pendidikan Dasar yang memenuhi standar minimal mutu pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal;
- b. Perbaiki semua aspek yang mendukung mutu Pendidikan Dasar, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta proses pembelajaran.

4. Program Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target provinsi dan target nasional tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan penggabungan (*regrouping*) sekolah yang berdekatan yang masih memiliki kapasitas atau kekurangan siswa;
- b. Memberdayakan dan meningkatkan mutu SMP Terbuka dan atau Paket B yang telah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu telah dilakukan konsolidasi dan perbaikan manajemen kelembagaan,

peningkatan kualitas guru bina dan pamong belajar, perbaikan mutu buku/modul, perbaikan proses belajar mengajar dan peningkatan dukungan serta kerjasama dengan masyarakat;

- c. Melaksanakan program paket A dan paket B dalam menangani anak usia pendidikan dasar yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti pendidikan pada jalur formal atau disebabkan karena putus sekolah;
- d. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai salah satu kelembagaan Pendidikan Nonformal untuk menyelenggarakan Program Paket A dan Paket B;
- e. Melakukan konsolidasi kecil, SD satu guru, SMP kecil dan SMP Terpadu, agar lembaga pendidikan ini dapat lebih diberdayakan dan ditingkatkan kualitas pelayanan pendidikannya bagi warga masyarakat yang membutuhkannya;
- f. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah 7-15 Tahun yang merupakan target khusus Pendidikan dasar 9 tahun, seperti anak-anak yang berasal dari daerah terpencil, anak-anak yang terlantarkan dan kelompok anak-anak lain yang masih belum terjangkau pelayanan pendidikan dasar;
- g. Meningkatkan, kualifikasi, kompetensi, profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar melalui pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan serta diklat profesional;
- h. Melanjutkan kualifikasi guru SD/MI dan SMP/MTs serta pamong belajar dan sertifikasi guru, sehingga para tenaga pendidik tersebut mendapat pendidikan yang lebih tinggi;
- i. Melanjutkan pengadaan buku/modul mata pelajaran yang berkualitas terutama buku/modul pelajaran yang diujikan (Ujian Negara), sehingga rasio buku dan murid mencapai 1:1 untuk mata pelajaran yang diujikan;
- j. Memperbaiki sistem informasi manajemen untuk dapat mampu menyediakan data yang akurat dan selalu aktual sebagai dasar bagi perencanaan dan pelayanan yang lebih baik;
- k. Peningkatan upaya pengurangan siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan, antara lain melalui beasiswa bagi siswa SD dan SMP yang kurang mampu namun berprestasi dan memberikan dana bantuan

operasional bagi satuan pendidikan yang berada di kantong-kantong masyarakat yang mengalami kesulitan dalam akses Pendidikan;

- l. Peningkatan program konsolidasi dan revitalisasi satuan pendidikan khususnya pada pendidikan dasar;
- m. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pengelola satuan pendidikan yang mandiri, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- n. Peningkatan usaha pengembangan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan komite sekolah di tingkat SD/MI dan SMP/MTs;

BAB IV

PENDIDIKAN KEAKSARAAN

A. Analisis Situasi dan Kondisi

1. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan pendidikan keaksaraan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja pendidikan dasar bagi kelompok usia sekolah. Kegiatan dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kelompok buta aksara baru baik sebagai akibat adanya anak usia 7-12 tahun yang tidak terlayani pendidikan dasar, maupun anak putus sekolah pendidikan dasar;
- b. Peningkatan jumlah kelompok belajar keaksaraan melalui peningkatan jumlah pusat bacaan masyarakat di lokasi yang teridentifikasi tinggi buta aksara serta peningkatan sumber daya;
- c. Peningkatan kerjasama lintas sektor, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga internasional termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut program keaksaraan;
- d. Peningkatan layanan program keaksaraan fungsional yang lebih merata dengan penentuan target grup secara jelas baik menurut kelompok umur, wilayah, jenis kelamin, dan kelompok pendapatan;
- e. Penyediaan bahan bacaan yang terkait dengan berbagai keterampilan fungsional, dan penyajiannya disesuaikan dengan tingkat keaksaraan;
- f. Peningkatan program pendukung untuk mempertahankan kemampuan keaksaraan yang pernah diperoleh oleh lulusan sehingga dapat terus dipertahankan kemampuan keaksaraannya sekaligus pengintegrasian program keaksaraan fungsional dalam program pendidikan kecakapan hidup;
- g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tutor dan pengelola program keaksaraan, peningkatan dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

- h. Peningkatan sistem pengendalian program bekerjasama dengan para penyelenggara dan pengelola program keaksaraan, juga mendorong pembentukan kelompok tutor keaksaraan di kelurahan/desa, kecamatan, dan kabupaten/kota;
- i. Menggugah dan mendorong pimpinan daerah untuk menempatkan pemberantasan buta aksara menjadi prioritas dalam pembangunan yang meliputi: (1) peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana dan penganggaran program keaksaraan, (2) peningkatan peranan Forum Keaksaraan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, (3) peningkatan pemanfaatan PKBM sebagai tempat pelaksanaan program;
- j. Mempercepat pembentukan Forum Komunikasi Tutor, yang kemudian diperluas menjadi Forum Komunikasi Tutor Pendidikan Keaksaraan dan pelaksanaan studi kebijakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program pendidikan keaksaraan, agar dapat menjawab kebutuhan spesifik lokal dengan mutu yang lebih baik;
- k. Strategi dan program difokuskan pada kelompok sasaran tertentu, terutama: (1) kelompok masyarakat yang berbicara bahasa ibu, (2) masyarakat miskin pedalaman, termasuk penduduk pulau terpencil, dan (3) kelompok yang tidak terlayani, seperti masyarakat miskin kota.

2. Kinerja Pelaksanaan Program

Program pemberantasan buta aksara diselenggarakan pada dua tahun terakhir menunjukkan keberhasilan. Sebagaimana terlihat dari persentasi penurunan jumlah orang dewasa usia 15 tahun ke atas yang melek huruf. Pada tahun 2010 dari 5,0%, dan tahun 2011 naik menjadi 4,8%.

Tabel: 4.1
Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 - 59 Tahun 2011-2012

No	Provinsi	2011			2012		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,390,106	1,379,492	2,769,598	1,451,165	1,431,980	2,883,144
2	Sumatera Utara	3,922,688	3,841,081	7,763,769	4,045,230	4,016,042	8,061,272
3	Sumatera Barat	1,438,626	1,417,988	2,856,615	1,484,445	1,484,182	2,968,627
4	RIAU	1,797,693	1,726,323	3,524,017	1,874,580	1,749,902	3,624,482
5	Jambi	1,004,384	957,704	1,962,088	1,053,508	979,199	2,032,708

No	Provinsi	2011			2012		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6	Sumatera Selatan	2,421,836	2,261,193	4,683,029	2,467,405	2,350,864	4,818,269
7	Bengkulu	555,368	514,915	1,070,283	575,392	537,397	1,112,789
8	Lampung	2,474,724	2,264,280	4,739,003	2,533,458	2,345,572	4,879,029
9	Bangka Belitung	412,892	368,945	781,838	433,756	381,918	815,674
10	Kepulauan Riau	574,976	581,030	1,156,006	643,074	612,547	1,255,621
11	DKI Jakarta	3,380,950	3,421,305	6,802,255	3,521,205	3,438,443	6,959,648
12	Jawa Barat	13,904,457	13,199,895	27,104,352	14,447,758	13,631,872	28,079,630
13	Jawa Tengah	9,750,374	9,580,443	19,330,817	10,047,123	9,858,998	19,906,122
14	DI Yogyakarta	1,085,115	1,113,980	2,199,095	1,146,276	1,144,900	2,291,176
15	Jawa Timur	11,463,486	11,278,991	22,742,477	11,644,260	11,473,986	23,118,246
16	Banten	3,564,149	3,392,353	6,956,501	3,722,167	3,498,877	7,221,044
17	Bali	1,221,048	1,149,848	2,370,897	1,281,854	1,181,021	2,462,875
18	Nusa Tenggara Barat	1,180,639	1,255,605	2,436,244	1,245,402	1,285,244	2,530,646
19	Nusa Tenggara Timur	1,160,279	1,220,566	2,380,845	1,222,337	1,270,143	2,492,480
20	Kalimantan Barat	1,325,173	1,209,959	2,535,132	1,402,950	1,276,049	2,678,999
21	Kalimantan Tengah	729,042	671,750	1,400,792	790,634	701,327	1,491,960
22	Kalimantan Selatan	1,166,198	1,150,720	2,316,918	1,229,810	1,176,431	2,406,241
23	Kalimantan Timur	1,236,556	1,107,255	2,343,811	1,290,215	1,128,081	2,418,296
24	Sulawesi Utara	733,265	705,204	1,438,469	762,544	717,881	1,480,426
25	Sulawesi Tengah	800,930	755,059	1,555,989	833,135	788,027	1,621,162
26	Sulawesi Selatan	2,173,213	2,326,158	4,499,371	2,277,210	2,401,874	4,679,083
27	Sulawesi Tenggara	636,263	623,610	1,259,874	664,057	653,009	1,317,066
28	Gorontalo	312,546	315,645	628,191	324,426	326,751	651,178
29	Sulawesi Barat	316,315	300,393	616,708	327,582	325,760	653,342
30	Maluku	441,011	436,207	877,218	458,724	448,902	907,626
31	Maluku Utara	316,687	297,827	614,515	379,733	339,960	719,694
32	Papua Barat	236,858	215,227	452,084	243,654	209,611	453,265
33	Papua	694,993	506,494	1,201,487	711,981	524,513	1,236,494
	Indonesia	73,822,843	71,547,445	145,370,287	76,537,051	73,691,263	150,228,314

Sumber: Badan Pusat Statistik RI (susenas 2011 & 2012)

Lambatnya laju penurunan angka buta aksara diduga karena tinggal sisa kelompok tersulit (*hardrock*) dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor

eksternal seperti inefisiensi pada pendidikan persekolahan dan luar sekolah serta ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Pendidikan keaksaraan yang umumnya diberikan dalam kelompok belajar sulit untuk menjangkau penduduk buta aksara di daerah terpencil yang tempat tinggalnya secara umum menyebar. Kelompok tersulit lain adalah masyarakat yang belum memahami manfaat kemampuan keaksaraan sebagai kemampuan dasar untuk memperoleh nilai tambah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dalam meningkatkan produktivitas mereka.

Menghadapi tantangan dan masalah yang terkait dengan karakteristik sasaran yang termasuk kelompok sulit telah dilakukan terobosan dalam rangka percepatan penuntasan buta aksara dengan lahirnya Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar dan Pemberantasan Buta Aksara. Hasil yang diperoleh menunjukkan penurunan jumlah buta aksara yang terjadi cukup signifikan pada tiga tahun terakhir.

Oleh karena itu perlu perencanaan yang sangat matang dan perlu kerja keras dari seluruh elemen baik dari pemerintah, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan juga kesadaran dari masyarakat penyandang buta aksara. Sementara itu, Sementara itu, Pemerintah Provinsi sudah bertekad bahwa target penurunan penyandang buta aksara hingga tinggal 4,2% pada tahun 2015.

Tingkat keaksaraan antar kabupaten/kota sampai tahun 2011 masih sangat bervariasi dan terdapat kesenjangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada kelompok usia 15 tahun ke atas yang memiliki kesenjangan tingkat keaksaraan lebih besar. Kesenjangan tersebut dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Disparitas Angka Melak Huruf Laki-Laki Terhadap Perempuan Tahun 2011

No	Provinsi	Angka Melak Huruf 2011 (%)		
		Laki-laki	Perempuan	Disparitas
1	Nanggroe Aceh Darussalam	98.78	97.05	1.73
2	Sumatera Utara	99.01	97.71	1.29
3	Sumatera Barat	98.51	97.48	1.03
4	RIAU	99.01	97.92	1.10
5	Jambi	98.71	96.04	2.68
6	Sumatera Selatan	98.89	97.57	1.32
7	Bengkulu	98.59	96.07	2.52
8	Lampung	98.63	96.87	1.76

No	Provinsi	Angka Melak Huruf 2011 (%)		
		Laki-laki	Perempuan	Disparitas
9	Bangka Belitung	98.46	96.09	2.36
10	Kepulauan Riau	98.84	97.98	0.86
11	DKI Jakarta	99.78	99.08	0.70
12	Jawa Barat	98.70	96.92	1.78
13	Jawa Tengah	97.04	93.60	3.44
14	DI Yogyakarta	98.84	97.32	1.52
15	Jawa Timur	95.96	91.80	4.16
16	Banten	99.14	96.69	2.45
17	Bali	97.74	91.91	5.83
18	Nusa Tenggara Barat	92.21	84.61	7.60
19	Nusa Tenggara Timur	92.66	91.59	1.07
20	Kalimantan Barat	96.61	91.21	5.40
21	Kalimantan Tengah	99.06	97.74	1.32
22	Kalimantan Selatan	98.75	96.74	2.00
23	Kalimantan Timur	98.91	97.89	1.03
24	Sulawesi Utara	99.16	99.36	0.20
25	Sulawesi Tengah	96.87	95.88	0.99
26	Sulawesi Selatan	93.35	91.87	1.48
27	Sulawesi Tenggara	96.11	93.09	3.02
28	Gorontalo	95.80	96.81	1.01
29	Sulawesi Barat	92.73	90.95	1.79
30	Maluku	98.34	97.08	1.25
31	Maluku Utara	98.42	96.87	1.55
32	Papua Barat	96.78	92.53	4.26
33	Papua	71.72	58.83	12.89
	Indonesia	97.30	94.65	2.65

Sumber: Badan Pusat Statistik RI 2012

3. Analisis Pelaksanaan Program

Kinerja pelaksanaan program pendidikan keaksaraan sampai tahun 2010/2011 maka dapat dilakukan analisis dan identifikasi kebutuhan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis dengan membagi pada dua besaran analisis yaitu analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman).

Pelaksanaan program pemberantasan buta aksara (PBA) telah mampu menurunkan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sampai

95,0% pada 2010 dan 95,2% pada tahun 2011. Kondisi dan keberhasilan pelaksanaan program-program pendidikan keaksaraan ini tidak dapat dipisahkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Berbagai masalah yang harus dihadapi dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan keaksaraan antara lain:

- a. Sisa sasaran pendidikan keaksaraan adalah kelompok masyarakat sulit, baik ekonomi, fisik-geografis, maupun sosial-budaya. Mereka adalah kelompok masyarakat paling miskin, marginal, baik di perkotaan maupun pedesaan, tinggal di daerah yang terpencil, terisolir, dan budaya khusus. Sebagian besar mereka adalah warga masyarakat yang berusia di atas 45 tahun dengan minat belajar yang rendah dan sebagian besar mereka adalah perempuan;
- b. Hasil pelaksanaan program pendidikan keaksaraan yang kurang mendapatkan pembinaan tindak lanjut, melahirkan banyaknya peserta belajar yang cenderung buta aksara kembali;
- c. Data sasaran dan informasi pendidikan keaksaraan belum tersusun secara lengkap dan akurat sehingga menjadi kesulitan dalam pemetaan dan identifikasi calon peserta. Keadaan ini membawa implikasi terhadap penyusunan perencanaan program dan target pendidikan keaksaraan yang kurang mantap karena belum didasarkan pada data yang lengkap dan akurat;
- d. Kapasitas lembaga penyelenggara dan kompetensi pendidik maupun tenaga kependidikan pendidikan keaksaraan sangat beragam dan secara umum cenderung lemah/apa adanya. Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan dan program PNFI lainnya belum dilakukan;
- e. Sarana dan prasarana pendukung pendidikan keaksaraan masih terbatas, sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan yang lebih berbasis pada partisipasi masyarakat;
- f. Anggaran pendidikan nonformal dan informal, khususnya pendidikan keaksaraan masih relatif kecil apabila dikaitkan dengan jumlah sasaran. Beberapa daerah tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan keaksaraan;
- g. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan keaksaraan di era otonomi daerah cenderung kurang efektif sehingga

pelaksanaan program pendidikan keaksaraan sering kurang mendapat perhatian.

Secara internal kekuatan yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan sebagai berikut:

- a. Komitmen pemerintah yang dituangkan dalam Inpres dan Peraturan Menteri yang mengatur secara khusus tentang penuntasan buta aksara;
- b. Tertuangnya target dan indikator kinerja keaksaraan dalam Rencana Strategis Kemdiknas selaras dengan tujuan EFA, MDGs maupun capaian HDI;
- c. Adanya semangat voluntarisme dan partisipasi masyarakat sebagai pengelola, dan tutor atau pengajar dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;
- d. Tersedianya dana bantuan (*blockgrant*) dalam APBN dan Beberapa APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;
- e. Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik antara Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kemdiknas dengan lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita, perguruan tinggi, dan lain-lain yang dituangkan dalam bentuk MoU;
- f. Metode dan waktu pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Layanan pendidikan keaksaraan lebih berorientasi pada keterampilan fungsional dan *life skills*;
- g. Adanya sistem evaluasi dan sertifikasi (SUKMA) sehingga evaluasi dan pengendalian program dapat dikendalikan dengan baik;
- h. Dukungan anggaran (APBD) yang makin baik sehingga menjangkau jumlah sasaran pendidikan keaksaraan yang besar dan bervariasi;
- i. Lingkungan internasional/regional terkait dengan pengembangan program pendidikan keaksaraan melalui kerangka LIFE (*Literacy Initiative for Empowerment*) yang lebih berorientasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan tersedianya sistem evaluasi bertaraf internasional yaitu LAMP (*Literacy Assessment and Monitoring Program*) yang bisa diajarkan rujukan.

Sementara itu, kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan sebagai berikut:

- a. Masih adanya masyarakat paling miskin, marginal, di perkotaan, pedesaan, daerah tinggal dan terpencil, terisolir, yang berusia di atas 45 tahun dengan minat belajar yang rendah dan sebagian besar mereka adalah perempuan, masih banyak penyandang buta aksara;
- b. Keberhasilan pendidikan keaksaraan yang kurang mendapatkan pembinaan tindak lanjut, melahirkan banyaknya peserta belajar yang cenderung buta aksara kembali;
- c. Data sasaran dan informasi pendidikan keaksaraan belum tersusun secara lengkap dan akurat sehingga menjadi kesulitan dalam pemetaan dan identifikasi calon peserta;
- d. Kapasitas lembaga penyelenggara dan kompetensi pendidik maupun tenaga kependidikan pendidikan keaksaraan sangat beragam dan cenderung lemah, sehingga perlu dukungan memenuhi standar akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan.
- e. Anggaran pendidikan nonformal dan informal, khususnya pendidikan keaksaraan masih relatif kecil apabila dikaitkan dengan jumlah sasaran, sehingga dukungan daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan keaksaraan.

Beberapa tantangan yang harus dicermati dalam pelaksanaan program pendidikan keaksaraan sebagai berikut:

- a. Penurunan angka buta aksara pada tahun 2015 dengan target 4,2% yang berusia di atas 45 tahun dengan minat belajar rendah;
- b. Melakukan pembinaan penduduk melek huruf sebagai tindak lanjut program pendidikan keaksaraan agar tidak terjadi kecenderungan buta aksara kembali;
- c. Melakukan pendataan penduduk buta aksara belum tersusun secara lengkap dan akurat sehingga menjadi kesulitan dalam pemetaan dan identifikasi calon peserta;
- d. Membina lembaga penyelenggara dan kompetensi pendidik maupun tenaga kependidikan pendidikan keaksaraan sangat beragam;

- e. Menyediaan bantuan sarana dan prasarana pendukung pendidikan keaksaraan konsekuensi dari penyelenggaraan yang lebih berbasis pada partisipasi masyarakat;
- f. Menyediakan anggaran pendidikan nonformal dan informal, khususnya pendidikan keaksaraan sesuai dengan jumlah sasaran.

B. Hasil Pelaksanaan Program

2. Kebijakan Nasional

Pemerintah telah bertekad untuk menangani masalah penduduk buta aksara secara tuntas. Jumlah buta aksara masih potensial untuk meningkat terus sebagai eksese masalah-masalah sosial-ekonomi yang berakibat pada putus sekolah anak-anak kelas 1-3 SD/MI/ sederajat. Oleh karena itu, program pendidikan keaksaraan menempati peran strategis karena diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah fundamental sumber daya manusia yang menyangkut berbagai aspek kepentingan. Sejalan dengan hal itu perlu dikembangkan arah kebijakan, seperti berikut:

- a. Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara di bidang pendidikan, sekaligus sebagai upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pendidikan keaksaraan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas warga masyarakat dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dalam hal ini, pendidikan keaksaraan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta didik hingga mencapai kemampuan *basic literacy*.
- b. Pendidikan keaksaraan dengan pendekatan keaksaraan fungsional diharapkan dapat memberikan keterampilan praktis yang diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat di bidang ekonomi, terutama dalam rangka mendapatkan nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaksanaan pendidikan keaksaraan diupayakan semakin terarah, terencana, dan berkelanjutan agar sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. Program pendidikan keaksaraan dengan penekanan pada peningkatan kecakapan hidup (*life skills*) harus dapat dilaksanakan sesuai dengan standar keaksaraan yang jelas dan terukur. Dengan demikian, hasil-hasil yang diperoleh dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat pada

umumnya, peningkatan produktivitas kelompok sasaran pada khususnya. Untuk selanjutnya, perlu diperkuat pengembangan dan pelaksanaan program AKRAB (AKsaRa Agar Berdaya) sebagai adopsi dan adaptasi program LIFE (*literacy Initiative for Empowerment*) di Daerah.

- c. Pendidikan keaksaraan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas berpikir dan pengembangan kepribadian agar warga masyarakat mampu berperan dan bergaul dalam komunitas sosial, serta memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dan dinamika sosial dan budaya. Peningkatan kapasitas berpikir dan kepribadian akan lebih mampu menempatkan peran dan aktualisasi diri warga masyarakat, termasuk meningkatnya kepercayaan diri dan kesadaran sebagai warga negara, yang merupakan hal penting bagi pengembangan partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu pendidikan keaksaraan perlu dikembangkan dalam ragam keaksaraan dengan pendekatan-pendekatan yang kontekstual.
- d. Peningkatan kemampuan keaksaraan masyarakat merupakan investasi sumber daya manusia yang secara potensial dapat menggerakkan dinamika pembangunan sektoral dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Penurunan angka buta aksara secara nasional dengan sendirinya akan memperbaiki indeks pembangunan manusia (HDI) sebagai salah satu parameter kemajuan kualitas sumber daya manusia.
- e. Gerakkan pemberantasan buta aksara nasional, yang dicanangkan melalui Inpres No. 5 Tahun 2006, terutama diarahkan pada kantong-kantong buta aksara. Strategi horisontal dilaksanakan di mana pemerintah berupaya mengajak seluruh komponen masyarakat, seperti: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan komponen masyarakat lainnya agar Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PBA) dapat menjangkau seluas mungkin sasaran hingga ke pelosok-pelosok.

3. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka mengintensifkan program pendidikan keaksaraan untuk penuntasan buta aksara, pemerintah bersama-sama masyarakat melaksanakan pendekatan program AKRAB (AKsaRa Agar Berdaya), dengan strategi sebagai berikut:

a. Prioritas Sasaran pada Daerah Padat Buta Aksara

Pada tahun 2011, pemerintah provinsi telah memprioritaskan penuntasan buta aksara yang jumlah buta aksaranya masih tinggi di kabupaten/kota.

b. Keaksaraan Terintegrasi dengan Kecakapan Hidup

Pengalaman pelaksanaan pendidikan keaksaraan yang menjauhkan peserta didik dari kehidupan sehari-hari, baik dalam bahan ajar (pemilihan kata dan kalimat) maupun dalam konteks pengintegrasian ke dalam kecakapan hidup yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat setempat, menunjukkan bahwa program sulit mencapai hasil yang diharapkan, kurang efektif dan kecenderungan tidak bisa memelihara kompetensi keberaksaraan atau buta aksara kembali. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan keaksaraan dasar diintegrasikan dengan kecakapan hidup. Sedangkan untuk pemeliharaan dan pembinaan kemampuan keberaksaraan bagi aksarawan diarahkan melalui keaksaraan usaha mandiri yang dilakukan sejalan dengan kegiatan usaha yang berkembang di masyarakat.

c. Pengembangan Ragam Keaksaraan

Masyarakat yang masih buta aksara atau melek aksara parsial yang berada di kelompok yang sangat sulit (*hardrock*), baik karena kesulitan ekonomi, geografis, sosial-budaya, serta kemampuan personal karena sebagian besar dari mereka berusia 45 tahun ke atas. Untuk itu, strategi pengembangan ragam keaksaraan terus dilakukan melalui:

1) Aksara Kewirausahaan

Sebagai adaptasi program keberaksaraan yang dikaitkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat (*Literacy Initiative For Empowerment*), dalam kerangka kerja program AKRAB! (AKsaRa Agar Berdaya) disusun menu-menu pendidikan keaksaraan yang

dikaitkan dengan pemberdayaan sosil-ekonomi masyarakat agar peserta didik keaksaraan memiliki keterampilan kerja dan berwirausaha sehingga kesejahteraannya semakin meningkat. Program ini akan diimplementasikan dalam skema kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri dan Pengembangan Pusat Kewirausahaan Masyarakat berbasis Keaksaraan.

2) Keaksaraan Perempuan

Program pendidikan keaksaraan bagi perempuan telah diamanatkan dalam MDG's Tujuan 2 yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua, disebutkan pada Target 3 yaitu memastikan pada tahun 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Salah satu indikator terkait dengan buta aksara adalah angka melek huruf usia 15-24 tahun. Atas dasar itulah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Agama Provinsi, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan untuk melaksanakan program pemberantasan buta aksara penduduk usia 15-24 tahun dan usia 25-44 tahun yang jumlahnya tinggal sedikit. Prioritas pemberantasan buta aksara dan pendidikan keaksaraan dilakukan untuk usia 45 tahun ke atas dengan pendekatan yang lebih tepat.

3) Keaksaraan Komunitas Khusus

Sasaran prioritas pendidikan keaksaraan yang berada di daerah sulit secara geografis antara lain kelompok-kelompok masyarakat di daerah transmigrasi, pesisir, daerah sekitar hutan, kepulauan, dan daerah perbatasan. Untuk itu dilakukan strategi layanan keaksaraan di kawasan tertinggal dan terpencil serta kelompok-kelompok masyarakat marjinal di perkotaan maupun di perdesaan, yaitu:

a) Masyarakat Marjinal Perkotaan

Di perkotaan masih terdapat masyarakat yang buta aksara karena belum terjangkau (terlayani) oleh program pendidikan manapun. Umumnya mereka bertempat tinggal di kawasan kumuh dan selalu berpindah-pindah, seperti anak jalanan, pengemis, pemulung, dll.

b) Masyarakat Transmigrasi

Lokasi daerah transmigrasi pada umumnya berjarak 30 km dari ibukota kabupaten dan sekitar 10 km dari akses jalan ekonomi. Daerah transmigrasi merupakan wilayah yang padat penduduknya dan pada umumnya miskin serta minim fasilitas pendidikan sehingga jumlah buta aksara di daerah tersebut pada umumnya cukup besar.

c) Masyarakat di Daerah Pesisir

Masyarakat pesisir dan nelayan merupakan satu komunitas yang pada umumnya miskin dan di daerah tersebut biasanya juga terdapat cukup banyak buta aksara. Program pemberantasan buta aksara di daerah pesisir umumnya dilakukan dalam bentuk program pendidikan keaksaraan yang diperkuat dengan program pendidikan pemberdayaan perempuan dan usaha kecil. Program ini merupakan integrasi dari berbagai program lintas sektor termasuk program kesehatan dan keluarga berencana.

d) Masyarakat di Daerah Hutan

Masyarakat hutan merupakan penduduk yang berdomisili di sekitar hutan yang mata pencaharian mereka berladang dan berburu. Salah satu upaya membelajarkan masyarakat di sekitar hutan adalah melalui program pemberantasan buta aksara.

e) Masyarakat di Daerah Kepulauan

Program pemberantasan buta aksara bagi masyarakat kepulauan melalui kapal kunjung. Program pembelajarannya berlangsung di atas perahu apabila mereka sedang melaut dan di daratan apabila mereka telah kembali dari melaut sebagai mata pencaharian pokok mereka.

f) Masyarakat di Daerah Perbatasan

Masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan kebanyakan buta aksara karena terisolasi dari berbagai informasi dan sulitnya transportasi. Untuk itu dipandang perlu mengembangkan program pemberantasan buta aksara bagi mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai upaya perluasan

akses bagi mereka yang merupakan wujud pemberian pelayanan pendidikan kepadanya secara adil dan merata.

g) Masyarakat dengan Keyakinan atau Budaya Khusus

(1) Santri pada pesantren tradisional

Masih ada pesantren tradisional di provinsi yang perlu didukung dalam program peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan keaksaraan karena umumnya lokasi pesantren seperti ini biasanya terisolasi dari berbagai informasi dan transportasi, sehingga santri dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya ada yang buta aksara latin karena hanya mendalami pengetahuan agama melalui bahasa/tulisan Arab.

(2) Masyarakat/Komunitas Adat

Masih terdapat penduduk yang tergolong masyarakat terpencil, kebanyakan dari komunitas adat terpencil masih tergolong buta aksara karena sulit menerima perubahan, kurang bersosialisasi dengan masyarakat luar, kurang terbuka terhadap orang lain, menggantungkan hidupnya terhadap lingkungan, dan sulit mengubah perilakunya.

4) Keaksaraan dengan Bahasa Ibu

Mengingat masih banyaknya suku di daerah yang dalam komunikasi sehari-harinya tidak bertutur dengan Bahasa Indonesia, maka pemerintah menetapkan kebijakan untuk menggunakan bahasa ibu dalam proses pembelajaran pendidikan keaksaraan. Kemudian secara bertahap pembelajaran diselingi dengan Bahasa Indonesia karena Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang wajib dipelajari oleh setiap warga negara. Penggunaan bahasa ibu dalam proses pembelajaran bagi masyarakat tersebut ternyata dapat mempercepat pemahaman kemampuan warga belajar dalam belajar membaca dan menulis serta meningkatkan mutu hasil belajar.

5) Pengembangan Kemitraan

Kemitraan dengan lintas sektor (pemerintah), pemerintah daerah (kabupaten/kota) serta lembaga kemasyarakatan dilaksanakan sebagai implementasi strategi vertikal dan horisontal yang memungkinkan pelaksanaan penuntasan buta aksara dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaan kemitraan dalam bentuk kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai lembaga masyarakat dan/atau instansi pemerintah akan dilaksanakan secara intensif, terarah, terencana, saling menguntungkan dan berkelanjutan.

6) Sosialisasi, Promosi, dan Akuntabilitas

Secara operasional, keberhasilan penuntasan buta aksara sangat tergantung pada peran serta seluruh komponen masyarakat, swasta, dan pemerintah (termasuk daerah). Untuk itu, sosialisasi dan promosi program dilaksanakan secara intensif, baik melalui jalur media seperti iklan TV, radio, internet, media cetak, melalui jalur birokrasi, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Hari Aksara Internasional (HAI) menjadi momentum kegiatan sosialisasi sekaligus unjuk kinerja akuntabilitas program pendidikan keaksaraan dalam penuntasan buta aksara.

7) Assessment dan pendataan

Keberhasilan pelaksanaan penuntasan buta aksara sangat tergantung pada ketersediaan dan keakuratan data (kondisi dan posisi) sasaran/target terkini serta hasil pencapaian di setiap akhir periodisasi pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan melalui *assesment*, pendataan sasaran "*by name*", kerjasama dan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, dan memanfaatkan LAMP (*Literacy Assessment Monitoring Program*).

8) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah, Lembaga dan Ketenagaan

Keberhasilan penuntasan buta aksara dapat dicapai dengan dukungan kapasitas dan kompetensi lembaga penyelenggara, pendidik dan tenaga kependidikan, serta kapasitas pemerintahan (Pusat maupun Daerah). Kompetensi dan kapasitas tersebut perlu didukung dengan penyediaan anggaran melalui pemberian dana *blockgrant* untuk

penyelenggara, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta pengendali mutu melalui P2PNFI/BPPNFI, BPKB/SKB, Perguruan Tinggi atau lembaga masyarakat yang kompeten., Penetapan dan pelaksanaan kebijakan di daerah melalui Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota diharapkan dapat meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan program.

3. Sasaran dan Target Capaian

Sasaran dan target capaian pendidikan keaksaraan ditetapkan berdasarkan sejumlah komitmen baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, selain mempertimbangkan kondisi internal hasil pelaksanaan pendidikan keaksaraan selama ini di daerah, sasaran dan target capaian pendidikan keaksaraan ditetapkan dengan mengacu kepada kesepakatan Dakar tahun 2000 tentang *Education for All* (EFA) dan Komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs). Pada tujuan 4 program EFA dirumuskan target pendidikan keaksaraan yaitu tercapainya 50% keniraksaraan orang dewasa, terutama perempuan, dan kesetaraan akses pendidikan dasar dan pendidikan sepanjang hayat bagi mereka. Sementara itu, dalam Target MDG's ditetapkan pada Tujuan 2: Mencapai pendidikan dasar untuk semua, yang kemudian pada Target 3 dirumuskan yaitu memastikan pada tahun 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Dengan pemenuhan pendidikan dasar bagi semua warga maka diasumsikan bahwa jumlah penduduk buta aksara akan berkurang bahkan tidak ada.

BAB V

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (PKH)

A. Analisis Situasi dan Kondisi

1. Mekanisme Pelaksanaan Program

Mekanisme pengorganisasian pelaksanaan PKH pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan melalui: (a) Lembaga Kursus dan Pelatihan pendidikan non-formal; (b) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); (c) Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-PNFI), (d) Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP), (e) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), (f) Lembaga Pengembangan Terpadu Masyarakat (LPTM) seperti pondok pesantren, yayasan yang menangani pendidikan nonformal, dll, (g) Lembaga Pengabdian masyarakat (LPM) pada perguruan tinggi yang peduli pendidikan nonformal, (h) organisasi kepemudaan, yayasan dan koperasi yang menangani pemuda.

Penanggungjawab pengelolaan program PKH terdiri atas empat unsur: (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota, kelurahan/desa), (c) Lembaga Swadaya Masyarakat, (d) masyarakat lokal. Pengelolaan program meliputi pelaksanaan fungsi pengelolaan pendidikan yang terkait dengan: (a) pengembangan kurikulum, (b) pengembangan, produksi, dan distribusi bahan belajar (buku dan modul), (c) bantuan teknis pengembangan kegiatan belajar, (d) pengelolaan pelatihan tenaga pendidik. Sedangkan pengelolaan sumber daya terdiri atas pengelolaan tenaga kependidikan, sistem informasi, partisipasi dan kontribusi dari masyarakat, serta kegiatan sosialisasi, advokasi dan evaluasi.

Pemerintah provinsi dalam memfasilitasi dan menyediakan PKH yang meliputi: (a) dana belajar atau beasiswa bagi peserta didik, (b) pengadaan sarana dan prasarana belajar, (c) pengadaan bahan belajar, modul keterampilan, dan bahan penunjang lainnya, (d) pembinaan dan pengembangan UKS, (e) honorarium tenaga pendidik dan pengelola, (f) penilaian atau uji kompetensi, (g) dana belajar usaha, (h) sosialisasi, promosi dan advokasi, (i) pemantauan, evaluasi bantuan teknis dan studi.

2. Kinerja Pelaksanaan Program

Tingkat pendidikan angkatan kerja, meskipun lambat laun terus meningkat, secara relatif masih rendah. Sebagian besar merupakan akibat dari keterbatasan akses ke pendidikan menengah dan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tantangannya terletak pada penyediaan peluang pembelajaran sepanjang hayat bagi angkatan kerja yang perlu meningkatkan kualifikasi dan keterampilan mereka seiring dengan tantangan dan tuntutan dunia kerja.

Tabel 5.1
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2012

No	Provinsi	Pendidikan Yang Ditamatkan (Lulusan) 2012						Jumlah
		SD	SMP	SMTA Umum	SMTA Kej.	Akademi/ D III	Universitas	
1	NAD	700,267	444,243	512,062	81,593	95,475	144,851	1,978,491
2	Sumatera Utara	2,140,625	1,469,528	1,339,102	667,582	166,104	348,723	6,131,664
3	Sumatera Barat	902,892	421,635	409,175	208,028	75,224	162,872	2,179,826
4	RIAU	988,735	516,069	534,570	221,135	82,441	163,826	2,506,776
5	Jambi	704,399	277,439	248,821	92,053	51,124	97,084	1,470,920
6	Sumatera Selatan	1,872,240	663,182	656,497	225,244	94,101	235,109	3,746,373
7	Bengkulu	363,083	176,684	167,980	67,233	22,329	64,085	861,394
8	Lampung	1,722,754	789,236	568,812	283,171	94,797	179,127	3,637,897
9	Bangka Belitung	308,767	88,617	94,844	64,917	20,487	26,531	604,163
10	Kepulauan Riau	220,572	138,004	248,161	159,779	41,592	63,257	871,365
11	DKI Jakarta	1,035,736	974,506	1,354,340	989,194	301,305	713,491	5,368,572
12	Jawa Barat	9,964,132	3,814,593	2,994,712	1,785,779	481,247	1,109,631	20,150,094
13	Jawa Tengah	9,332,104	3,326,748	1,922,207	1,378,642	364,843	770,487	17,095,031
14	DI Yogyakarta	668,553	355,630	335,857	325,828	69,710	189,280	1,944,858
15	Jawa Timur	10,735,870	3,517,663	2,554,519	1,722,218	333,814	1,037,474	19,901,558
16	Banten	1,985,672	990,519	938,859	652,401	187,581	370,025	5,125,057
17	Bali	921,777	353,492	464,611	276,516	104,173	195,464	2,316,033
18	Nusa Tenggara Barat	1,158,160	324,411	336,642	69,772	46,931	152,796	2,088,712
19	Nusa Tenggara Timur	1,402,144	261,104	239,592	101,161	52,776	101,262	2,158,039
20	Kalimantan Barat	1,281,910	345,911	314,322	98,802	54,944	86,635	2,182,524
21	Kalimantan Tengah	564,168	221,579	174,001	51,844	27,393	66,278	1,105,263
22	Kalimantan Selatan	1,011,003	365,834	281,088	115,764	40,558	107,904	1,922,151
23	Kalimantan Timur	620,330	326,761	411,859	221,099	53,283	144,049	1,777,381
24	Sulawesi Utara	367,771	205,719	244,528	103,518	27,416	89,176	1,038,128
25	Sulawesi Tengah	591,251	209,343	208,704	78,480	36,000	89,285	1,213,063

No	Provinsi	Pendidikan Yang Ditamatkan (Lulusan) 2012						Jumlah
		SD	SMP	SMTA Umum	SMTA Kej.	Akademi/ D III	Universitas	
26	Sulawesi Selatan	1,665,050	565,610	647,669	212,615	92,624	377,323	3,560,891
27	Sulawesi Tenggara	451,325	181,205	205,072	51,350	38,378	89,627	1,016,957
28	Gorontalo	288,573	54,889	56,878	27,165	11,116	27,452	466,073
29	Sulawesi Barat	320,910	85,657	72,945	33,389	14,126	33,735	560,762
30	Maluku	260,730	123,902	152,433	42,303	29,069	51,516	659,953
31	Maluku Utara	205,826	94,435	98,118	20,926	17,629	29,176	466,110
32	Papua Barat	152,531	59,375	74,156	34,587	12,003	28,945	361,597
33	Papua	1,003,642	180,682	217,210	81,045	29,850	73,005	1,585,434
	Indonesia	55,913,502	21,924,205	19,080,346	10,545,133	3,170,443	7,419,481	118,053,110

Sumber: BPS RI (Sakernas Agustus 2012)

Tabel 5.2
Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2012

No	Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka Tahun 2011						Jumlah
		SD	SMP	SMTA Umum	SMTA Kej.	Akademi/ D III	Universitas	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	32,064	39,577	80,598	11,160	5,750	10,795	179,944
2	Sumatera Utara	74,010	95,093	135,076	41,135	17,163	17,505	379,982
3	Sumatera Barat	34,975	27,075	43,273	19,837	3,875	13,149	142,184
4	RIAU	24,057	23,732	35,915	12,766	3,398	7,906	107,774
5	Jambi	10,803	7,058	17,539	5,626	956	5,314	47,296
6	Sumatera Selatan	58,389	37,810	69,410	21,466	8,988	17,378	213,441
7	Bengkulu	4,605	6,670	11,510	4,947	532	2,864	31,128
8	Lampung	46,615	41,455	63,851	22,755	4,751	9,163	188,590
9	Bangka Belitung	7,837	2,374	4,812	3,639	1,665	734	21,061
10	Kepulauan Riau	5,173	8,273	18,281	11,826	1,123	2,122	46,798
11	DKI Jakarta	80,774	103,618	150,002	91,970	24,680	78,932	529,976
12	Jawa Barat	627,620	509,412	353,542	254,232	34,852	49,328	1,828,986
13	Jawa Tengah	318,255	265,010	185,062	133,808	19,340	40,666	962,141
14	DI Yogyakarta	7,447	14,461	16,148	24,181	4,701	10,212	77,150
15	Jawa Timur	230,771	177,674	186,256	165,675	18,228	40,959	819,563
16	Banten	161,343	125,118	108,608	79,780	14,330	30,031	519,210
17	Bali	9,306	6,456	12,344	10,551	3,682	4,986	47,325
18	Nusa Tenggara Barat	32,679	20,548	35,506	10,994	2,327	7,894	109,948
19	Nusa Tenggara Timur	21,152	8,783	16,432	8,507	1,741	5,741	62,356
20	Kalimantan Barat	26,861	15,788	22,231	6,788	1,864	2,478	76,010
21	Kalimantan Tengah	9,309	6,836	10,063	3,595	1,084	4,166	35,053
22	Kalimantan Selatan	39,635	23,514	22,742	9,802	1,234	3,897	100,824

No	Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka Tahun 2011						Jumlah
		SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kej.	Akademi/D III	Universitas	
23	Kalimantan Timur	37,921	46,388	48,519	18,944	976	5,515	158,263
24	Sulawesi Utara	16,099	15,750	29,686	11,941	1,317	6,043	80,836
25	Sulawesi Tengah	12,798	5,357	16,042	5,192	1,538	6,694	47,621
26	Sulawesi Selatan	59,173	38,877	59,127	21,475	5,398	24,933	208,983
27	Sulawesi Tenggara	6,109	4,965	15,440	4,821	3,495	6,248	41,078
28	Gorontalo	8,204	3,181	4,910	1,764	522	1,763	20,344
29	Sulawesi Barat	5,057	2,899	1,555	1,754	593	121	11,979
30	Maluku	5,397	5,576	22,046	4,486	3,197	8,889	49,591
31	Maluku Utara	6,307	3,472	7,837	2,011	680	1,857	22,164
32	Papua Barat	3,762	2,515	6,847	4,088	492	2,152	19,856
33	Papua	10,791	5,979	20,899	9,749	2,308	7,775	57,501
	Indonesia	2,035,298	1,701,294	1,832,109	1,041,265	196,780	438,210	7,244,956

Sumber: BPS RI (Sakernas Agustus 2012)

Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di provinsi mengidentifikasi rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan yang tidak berorientasi keterampilan menjadi faktor utama rendahnya daya saing dan kinerja. Selain itu hambatan utama datang dari kurangnya peluang peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja. Begitu juga halnya dengan kurang tersedianya peluang kursus atau pelatihan dan pendidikan menengah di pedesaan menjadi hambatan program diversifikasi ekonomi dan produktivitas angkatan kerja non pertanian.

Tabel 5.2
Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Provinsi	2011		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nangroe Aceh Darussalam	95,919	84,025	179,944
2	Sumatera Utara	194,933	185,049	379,982
3	Sumatera Barat	80,143	62,041	142,184
4	RIAU	55,333	52,441	107,774
5	Jambi	26,203	21,093	47,296
6	Sumatera Selatan	114,521	98,920	213,441
7	Bengkulu	14,691	16,437	31,128
8	Lampung	85,619	102,971	188,590
9	Bangka Belitung	10,601	10,460	21,061
10	Kepulauan Riau	30,815	15,983	46,798

No	Provinsi	2011		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11	DKI Jakarta	290,052	239,924	529,976
12	Jawa Barat	1,196,140	632,846	1,828,986
13	Jawa Tengah	540,336	421,805	962,141
14	DI Yogyakarta	44,244	32,906	77,150
15	Jawa Timur	466,584	352,979	819,563
16	Banten	337,399	181,811	519,210
17	Bali	26,260	21,065	47,325
18	Nusa Tenggara Barat	64,571	45,377	109,948
19	Nusa Tenggara Timur	30,256	32,100	62,356
20	Kalimantan Barat	44,218	31,792	76,010
21	Kalimantan Tengah	19,115	15,938	35,053
22	Kalimantan Selatan	52,689	48,135	100,824
23	Kalimantan Timur	109,743	48,520	158,263
24	Sulawesi Utara	39,490	41,346	80,836
25	Sulawesi Tengah	25,651	21,970	47,621
26	Sulawesi Selatan	103,178	105,805	208,983
27	Sulawesi Tenggara	17,171	23,907	41,078
28	Gorontalo	9,001	11,343	20,344
29	Sulawesi Barat	6,034	5,945	11,979
30	Maluku	28,767	20,824	49,591
31	Maluku Utara	11,186	10,978	22,164
32	Papua Barat	10,879	8,977	19,856
33	Papua	34,041	23,460	57,501
	Indonesia	4,215,783	3,029,173	7,244,956

Sumber: BPS RI (sakernas Agustus 2012)

Kurangnya jumlah lulusan sekolah menengah atas/ sederajat dan perguruan tinggi yang bermutu serta rendahnya mutu/kompatibilitas program pendidikan wirausaha/bisnis di sekolah dan universitas juga dianggap sebagai faktor yang menghambat pembangunan *Small Medium Enterprise* (usaha kecil, menengah, dan mikro) di pedesaan. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penghasilan angkatan kerja, terutama di daerah pedesaan yang miskin adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan melalui kursus-kursus dan pelatihan yang sesuai dengan potensi pedesaan sehingga mereka dapat bekerja atau berusaha untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka.

Langkah awal yang penting untuk memfasilitasi pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan sepanjang hayat adalah dengan meningkatkan angka melanjutkan ke pendidikan menengah. Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP ke SMA telah mendorong peningkatan kinerja nasional. Dalam jangka panjang, meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah yang berkualitas memungkinkan peningkatan angka melanjutkan baik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bentuk-bentuk kursus dan pelatihan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada angka partisipasi sekolah menengah kejuruan dan pendidikan teknik.

Angka partisipasi program pendidikan kecakapan hidup meningkat cukup berarti. Program terdiri dari program 'life skills' di kota dan di desa (tingkat kecamatan dan kelurahan) beserta program-program rintisan. Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan program dengan memberikan 'blockgrant' kepada satuan-satuan pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan nonformal seperti lembaga kursus dan lembaga pelatihan, PKBM dan kelompok masyarakat. Berbagai bidang keterampilan atau keahlian diberikan atau dibelajarkan kepada peserta didik pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan pelatihan keterampilan atau kursus kewirausahaan dan kursus para profesi. SMK-SMK juga memperluas usaha-usaha perolehan dana melalui unit-unit usaha skala kecil dan membuka kelas siang dan sore untuk orang dewasa.

3. Analisis Pelaksanaan Program

Berdasarkan kinerja pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dapat dilakukan analisis dan identifikasi kebutuhan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analisis dengan membagi pada dua besaran analisis yaitu *analisis lingkungan internal* (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis lingkungan internal merupakan upaya untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program-program yang terkait dengan Pendidikan Kecakapan Hidup. Sedangkan *analisis eksternal* merupakan upaya untuk memahami peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program-program Pendidikan Kecakapan Hidup sehingga tingkat keberhasilannya dapat diprediksi secara tepat. Kondisi dan keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Hidup tidak

dapat dipisahkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Berbagai masalah yang harus dihadapi dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan kecakapan hidup antara lain:

- a. Penyelenggaraan program-program keterampilan kurang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), yang mengakibatkan tidak relevan keterampilan yang dimiliki peserta PKH dengan tuntutan DUDI saat ini.
- b. Lembaga kursus dan keterampilan masih kurang memberikan bekal pada kecakapan generik yang meliputi kecakapan sosial dan personal, antara lain, berperilaku hidup sehat, kecakapan bekerjasama, kecakapan berkomunikasi, kecakapan berfikir secara kritis, dan memiliki nilai-nilai dan sikap (*value and attitude*) antara lain: disiplin, bertanggungjawab, menghargai orang lain. Dengan demikian para lulusan lembaga kursus masih banyak yang mengalami kesulitan ketika terjun ke dunia kerja karena kurangnya pembekalan dalam kecakapan generik.
- c. Peran lembaga kursus dalam mengubah pola pikir kaum muda (tenaga kerja produktif) untuk dapat memiliki jiwa 'kewirausahaan' yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sekaligus mengatasi kecemasan atas masalah sosial yang dialami oleh banyak lulusan lembaga kursus dan keterampilan.

Adapun kekuatan dari pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Hidup ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- a. Komitmen pemerintah dan dukungan legislatif sangat baik dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Hidup. Hal ini terkait dengan adanya target dan indikator keberhasilan Program Pendidikan dalam MDGs dan HDI.
- b. Adanya semangat yang tinggi dari para keluarga baik di perkotaan maupun pedesaan untuk memprioritaskan pendidikan dan keterampilan.
- c. Adanya bantuan dana (*blockgrant*) kepada lembaga-lembaga penyelenggara kursus dan keterampilan untuk mendukung terlaksananya program Pendidikan Kecakapan Hidup.
- d. Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita, perguruan

tinggi, dan lain-lain, yang sepenuhnya memberikan dukungan bagi keberhasilan program Pendidikan Kecakapan Hidup di Indonesia.

Sementara itu beberapa kelemahan yang terlihat dari pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Dalam implementasinya, masih banyak lembaga kursus yang kurang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sehingga masih menyelenggarakan program-program keterampilan yang tidak lagi relevan dan sejalan dengan tuntutan DUDI saat ini.
- b. Masih banyak lembaga kursus dan keterampilan yang hingga saat ini hanya membekali peserta didik dengan *vocational skills* saja, namun kurang memberikan bekal pada kecakapan generik (psycho-social) yang meliputi kecakapan sosial dan personal, antara lain, berperilaku hidup sehat, kecakapan bekerjasama, kecakapan berkomunikasi, kecakapan berfikir secara kritis, dan memiliki nilai-nilai dan sikap (value and attitude) antara lain: disiplin, bertanggungjawab, menghargai orang lain. Dengan demikian para lulusan lembaga kursus masih banyak yang mengalami kesulitan ketika terjun ke dunia kerja karena kurangnya pembekalan dalam kecakapan generik.
- c. Masih kurangnya peran lembaga kursus dalam mengubah '*mind set*' kaum muda (tenaga kerja produktif) untuk dapat memiliki jiwa 'kewirausahaan' sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Negara yang berkesinambungan sekaligus mengatasi kecemasan atas masalah sosial yang dialami oleh banyak lulusan lembaga kursus dan keterampilan.

Analisis lingkungan eksternal dapat dirumuskan beberapa peluang dan tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program-program di bidang Pendidikan Kecakapan Hidup. Adapun peluangnya adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas utama adalah upaya membangun sistem pendidikan kecakapan hidup dan informasi pelatihan yang mampu memahami keberagaman program, tingkat partisipasi, basis pembiayaan dan hal-hal lain dari semua pengelola lembaga pendidikan negeri dan swasta. Analisa terinci dari informasi tersebut akan dapat membantu mengidentifikasi 'kisah sukses', menganalisa efektifitas biaya dan keberlangsungan berbagai pendekatan sebagai bagian dari kebijakan

pendidikan kecakapan hidup/pelatihan dan pengembangan strategi. Secara khusus, karena banyak dari penyelenggara pendidikan kecakapan hidup adalah sektor swasta yang mengacu pada kebutuhan pasar/*demand side*, oleh karena itu, yang paling penting adalah memperjelas peran pemerintah bukan sebagai penyelenggara utama, akan tetapi lebih berperan sebagai penyelenggara pendidikan kecakapan hidup *post-basic*/lanjutan yang lebih responsif pasar serta sebagai penyusun sistem pelatihan. Sistem memfasilitasi keberlanjutan program didorong oleh *signal* kebutuhan pasar tenaga kerja, dilengkapi dengan seperangkat ukuran keberhasilan terkait dengan upaya menjamin akses ke peluang layanan pelatihan *post-basic* di kabupaten/kota miskin yang memiliki angka pengangguran paling tinggi.

- b. Perluasan peluang pembelajaran sepanjang hayat formal dan non-formal: prioritas selanjutnya adalah menjamin meluasnya peluang pendidikan menengah, perguruan tinggi dan pendidikan nonformal yang merata, terutama di kabupaten/kota yang belum terlayani. Program perluasan ini memerlukan perencanaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang mengacu pada kebijakan nasional. Ada beberapa isu utama dalam mempersiapkan perencanaan perluasan meliputi: (1) harmonisasi sekolah negeri, swasta dan madrasah sesuai dengan peta kebutuhan, (2) instrumen ukuran peningkatan jumlah siswa melanjutkan ke pendidikan menengah termasuk mengidentifikasi hambatan biaya, (3) cakupan model pengelolaan yang lebih inovatif diantaranya SMP/SMU dan 'community college'. Ada pula penyelenggaraan pendidikan menengah dan perguruan tinggi terpadu diantaranya program diploma/S1 melalui studi paruh waktu dan studi jarak jauh, (4) Penguatan kelembagaan PNF di daerah perkotaan dan pedesaan dan perlu terus diperluas untuk melayani berbagai kebutuhan belajar kecakapan hidup masyarakat.

Adapun tantangan dalam pelaksanaan program PKH adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Responsif kelembagaan Terhadap Kebutuhan Keterampilan Tenaga Kerja: karena jenis keterampilan, keahlian kerja serta syarat-syaratnya selalu berubah, dibutuhkan instrumen ukuran untuk menjamin lembaga-lembaga dapat merespon perubahan-perubahan ini. Adanya dua pihak penyelenggara pendidikan swasta maupun negeri, dengan

tanggung jawab pengelolaan masing-masing, dapat membantu mengidentifikasi dan merespon *signal* pasar. Selain itu tata kelola kelembagaan yang lebih luas yang mengundang partisipasi pengusaha dan pihak penting yang mempunyai informasi akan sangat membantu mengarahkan responsif kelembagaan. Pemberdayaan staf dan sumber-sumber, termasuk kegiatan perolehan dana, yang lebih fleksibel juga akan sangat membantu. Tidak hanya itu, pemerintah menggunakan studi survey lembaga-lembaga pelatihan tentang jumlah lulusan dan tenaga kerja lokal sebagai bagian dari proses perencanaan.

- b. Perluasan dan Pengembangan Magang: Magang di perusahaan-perusahaan sangat efektif dan efisien. Pelatihan kerja semacam itu yang biasanya terstruktur dan terencana dapat berupa kerja dengan upah atau tanpa upah. Program magang di perusahaan harus terkait dengan rencana strategi dan analisa kebutuhan perusahaan tersebut.
- c. Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan. Mengingat cepat usangnya suatu pengetahuan dan percepatan perkembangan teknologi, maka pelatihan dan pendidikan lanjutan mutlak diperlukan di semua lini pekerjaan, apakah sebagai manajer, supervisor, ataupun karyawan administrasi. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya di Asia dan Pasifik, Indonesia perlu menaruh perhatian besar untuk menyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lanjutan ini. Pelatihan dan pendidikan lanjutan harus holistik dan sistematis, terus dikembangkan dan diperluas mengacu pada kantong-kantong karir yang jelas, standarisasi dan akreditasi.
- d. Pengarusutamaan keterampilan kewirausahaan dalam pelatihan dan pendidikan teknik dan kejuruan. Tantangan-tantangan dunia kontemporer seperti globalisasi dan derasnya arus teknologi baru merubah skenario pasar di sebuah wilayah. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah pelajaran yang dapat dipetik di masa krisis ekonomi melanda dimana hampir semua negara Asia menghadapi masalah besar dalam mengendalikan bisnis/usaha dan pekerja mereka.
- e. Pengembangan Standar Kompetensi, Pengakuan dan Sertifikasi keterampilan. Standar harus disusun berdasarkan analisa pekerjaan dan tenaga kerja yang baik, melibatkan mitra sosial dan harus jelas terkait dengan syarat, sistem pekerjaan serta program pembelajaran, pendidikan dan pelatihan. Standar tersebut dapat menjadi panduan

pengembangan dan penyesuaian program pelatihan selanjutnya juga membantu tiap orang mengembangkan dan menjaga kemampuan kerjanya selama masa produktifnya.

B. Hasil Pelaksanaan Program

1. Kebijakan Nasional

Sejalan dengan target Dakar, sejak awal tahun 2000 digulirkan satu kebijakan nasional untuk mengembangkan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills Education*). Tujuan kebijakan pendidikan kecakapan hidup adalah memfungsikan pendidikan sesuai fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik menghadapi perannya di masa mendatang, memberikan peluang bagi institusi pelaksana pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan terbuka (berbasis luas dan mendasar) serta prinsip pendidikan sekolah, dan membekali tamatan dengan kecakapan hidup, agar kelak mampu menghadapi, dan memecahkan permasalahan hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, masyarakat dan warganegara.

Ada beberapa aspek dalam Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills Education*), yaitu : pertama, Kemampuan Khusus (*Generik Life Skills*) yang lebih cenderung pada *psychososial education*, yang memuat Kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan makhluk lingkungan, kemampuan sosial, termasuk kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial, dan nilai-nilai sikap seperti disiplin, tanggungjawab, jujur dan santun. Kedua, Kemampuan Khusus (*Specific Life Skills*) yaitu kemampuan penguasaan pengetahuan. (*Science Academic*) dan Kemampuan penguasaan keterampilan kejuruan (*Vocational*), yang terkait dengan aktifitas pekerjaan dalam mempertahankan hidup dan kehidupan.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka program pendidikan diorientasikan atau berorientasi pada *Life Skills* di semua jenjang pendidikan baik itu persekolahan maupun pendidikan luar sekolah secara terpadu dan berkesinambungan dengan tujuan untuk (a) mengakrabkan peserta didik dengan kehidupan nyata di lingkungannya sehari-hari, (b) menumbuhkan kesadaran tentang dirinya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan lingkungan, kesadaran akan makna/nilai kehidupan, termasuk kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat dan memiliki daya proteksi terhadap

pandemic HIV/AIDS maupun penyalahgunaan narkoba, (c) penanaman penguasaan keterampilan vokasional, (d) memacu kreatifitas, dan (e) mengembangkan peran sosial, (f) mengembangkan nilai-nilai sikap rasa percaya diri, tanggungjawab, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi, dan memiliki jiwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*) yang baik, (g) menguasai *science academic* yang merupakan basis pengembangan teknologi.

Life Skills pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal saat ini telah dilaksanakan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK dan RA), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Life skills pada jenjang pendidikan dasar ditekankan pada *Generic Life skills* yang menekankan pada pengembangan kemampuan *Psicho-sosial* dan pendidikan karakter, dengan maksud memberikan fondasi atau dasar-dasar yang kuat dalam rangka menghadapi peran dan kehidupan yang akan datang.

Life skills pada jenjang pendidikan menengah yaitu SMA/MA, ditekankan pada *Specific Life skills* dengan fokus *Academic Skills (Science)* dan *Generic Life skills* termasuk Psiko-sosial, *Vocational Skill* harus diberikan di SMA/MA sebagai bekal antisipasi memasuki dunia kerja apabila tidak melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi atau putus sekolah.

Life skills pada SMK, ditekankan pada penguasaan *Vocational Skills* dan *Generic Skills* termasuk *Psiko-sosial*. Sedangkan *Academic Skill* diberikan di SMK adalah *science academic* yang terkait langsung dengan penguasaan teknologi dan sebagai antisipasi bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikan, ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Life skills pada pendidikan luar sekolah difokuskan pada penyiapan warga belajar untuk bisa bekerja, dan berusaha mandiri, bersikap dan berperilaku positif, serta memiliki daya proteksi terhadap pandemik HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba serta kehamilan pada usia dini yang tidak diinginkan.

Dalam menunjang pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup, pemerintah menyediakan dukungan anggaran. Pada jalur pendidikan sekolah, pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan di TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Pada jalur pendidikan luar sekolah, pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan dalam bentuk kursus, pelatihan, pemagangan kelompok belajar, dan berbagai kegiatan pembelajaran lain yang ada di masyarakat.

Lembaga pendidikan luar sekolah yang sekarang menunjukkan peningkatan dalam melaksanakan pendidikan kecakapan hidup adalah: lembaga kursus, lembaga pelatihan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-PNFI), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Pengembangan Terpadu Masyarakat (LPTM) seperti pondok pesantren, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga/organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, industri, sanggar, majelis ta'lim, dan lembaga lain sejenisnya, serta Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Perguruan Tinggi yang peduli pendidikan nonformal dan informal.

2. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan

a. Tujuan

Secara umum tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa akan datang.

Secara khusus tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah untuk:

- 1) Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan.
- 2) Merancang pendidikan agar fungsional bagi kehidupan peserta didik dalam menghadapi hidupnya di masa akan datang.
- 3) Memberikan kesempatan kepada sekolah/institusi pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas, dan
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya masyarakat di lingkungan sekolah/institusi pendidikan sesuai dengan prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.
- 5) Membekali siswa dengan nilai-nilai psychososial agar bersikap positif dalam menghadapi kehidupan dan memiliki daya proteksi terhadap pandemik HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.

Pada akhirnya dari keseluruhan proses pendidikan diharapkan dapat:

- 1) Menghasilkan tamatan atau calon tenaga kerja yang berkualitas, siap memasuki dunia kerja atau untuk usaha mandiri/berwirausaha, dan mampu mengakses kesempatan kerja yang terbuka baik di tingkat lokal, domestik, maupun internasional.
- 2) Meningkatkan produktifitas masyarakat terutama pekerja dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi permintaan pasar.
- 3) Berkembangnya kegiatan usaha atau industri yang dikelola oleh perorangan, keluarga, kelompok keluarga, kelompok masyarakat yang mampu menyerap tenaga kerja, dan menjadi kekuatan untuk menumbuhkan industri dan ekonomi rakyat.
- 4) Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terhindar dari pandemik HIV/AIDS serta terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
- 5) Menurunnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin.
- 6) Meningkatnya penghasilan, kesejahteraan masyarakat.
- 7) Meningkatnya daya saing angkatan kerja untuk merebut kesempatan kerja yang terbuka, dan dalam menghasilkan produk yang dapat menembus pasar lokal, domestik dan internasional.

a. Strategi Kebijakan

Pengembangan dan pelembagaan pendidikan kecakapan hidup dalam kerangka makro pendidikan untuk semua, dan pendidikan sepanjang hayat, pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional yang dapat dijadikan sebagai landasan normatif maupun landasan operasional penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup bagi seluruh warga bangsa. Strategi kebijakan tersebut adalah:

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju tercapainya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- 2) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kecakapan hidup secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi

muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

- 3) Meningkatkan efisiensi manajemen penyelenggaraan pendidikan dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.
- 4) Perwujudan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh ahlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
- 5) Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan yang ada dalam masyarakat dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.
- 6) Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mengutamakan kerjasama sinergi dengan masyarakat.

b. Strategi Pelaksanaan

- 1) Mengembangkan dan melembagakan pendidikan kecakapan hidup yang berbasis pada masyarakat luas sejalan dengan prinsip "*broad based education*."
- 2) Mengembangkan dan melembagakan pendidikan kecakapan hidup pada berbagai lembaga dan satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan sekolah maupun pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan oleh pemerintah.
- 3) Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang sesuai dengan tuntutan perkembangan sains dan teknologi dan berorientasi pasar, focus pada permintaan pasar kerja.

- 4) Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang difokuskan pada menyiapkan peserta didik untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan siap untuk berusaha mandiri.
- 5) Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang diorientasikan dan diintegrasikan dengan pengembangan industri dan ekonomi masyarakat di tingkat lokal, dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal.
- 6) Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan psyschososial termasuk kemampuan proteksi untuk HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.
- 7) Memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi dari elemen masyarakat, prasarana dan sarana yang ada di masyarakat untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
- 8) Memberikan fasilitas, dan insentif pada daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
- 9) Mengintegrasikan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat desa, kota, dan masyarakat terasing.
- 10) Mengembangkan sistem pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup yang berbasis pada standar kompetensi.

3. Sasaran dan Target Capaian

Sasaran yang akan dicapai dalam perluasan akses pendidikan kecakapan hidup sejak usia dini hingga dewasa adalah:

- a. Menjamin bahwa keperluan belajar semua usia dapat dipenuhi melalui akses yang sama untuk mendapatkan layanan kegiatan belajar keterampilan hidup yang memadai untuk mengembangkan diri, bermental sehat, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Merancang berbagai jenis dan menu program pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, potensi lokal, kebutuhan masyarakat yang maju, dinamis, tenteram, aman dan sejahtera.

- c. Menciptakan sistem layanan pendidikan kecakapan hidup yang diperlukan oleh masyarakat dari berbagai lapisan, dan dari berbagai daerah yang karakteristik kebutuhannya berbeda-beda.
- d. Memantapkan gerakan nasional pengembangan dan pelebagaan pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan di sekolah dan pada pendidikan jalur luar sekolah.
- e. Mendinamisasi peran serta dan kontribusi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan keterampilan hidup.

Program perluasan akses pendidikan kecakapan hidup diprioritaskan pada penanggulangan tidak berkualitasnya sumberdaya manusia (tidak berkeahlian, bermental rendah, tidak berwawasan mutu).

Beberapa aspek dalam upaya peningkatan mutu yang dicanangkan dalam kaitannya dengan peningkatan mutu dan pengembangan kelembagaan pendidikan kecakapan hidup (*Life Skills*) adalah:

- a. Meningkatkan semua aspek mutu pendidikan baik yang merupakan aspek input, proses dan output, secara terintegrasi untuk menjamin keunggulan kemampuan dari semua peserta didik mengikuti pendidikan kecakapan hidup.
- b. Menetapkan layanan kendali mutu di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan.
- c. Merancang program peningkatan mutu seluruh komponen kependidikan yang dapat menjadi kekuatan dalam perluasan pendidikan kecakapan hidup yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.
- d. Menetapkan standar pelayanan minimal, dan standar kompetensi lulusan dengan mengacu pada standar kompetensi yang berlaku secara nasional maupun internasional.
- e. Melakukan kaji ulang sistem penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup yang lebih terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan, penanggulangan pengangguran, penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan, kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan sektor industri dan ekonomi rakyat.

Peningkatan pendidikan kecakapan hidup dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui indikator sebagai berikut:

- a. Tersedianya Lembaga/Institusi Pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas wahana pendidikan yang mampu melayani masyarakat usia jenjang sekolah/pemuda dan masyarakat (orang dewasa) diluar sekolah.
- b. Tersedianya kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kandepag kab/kota untuk dikdas dan provinsi untuk dikmen.
- c. Tersedia tenaga pendidik yang professional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, oleh karena itu tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- d. Tersedia sistem manajemen pengelolaan satuan pendidikan mulai pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, yang dikelola secara transparan dan melibatkan unsur masyarakat untuk berperan dalam peningkatan mutu pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- e. Tersedia bahan dan material pembelajaran serta sumber-sumber belajar lainnya yang dapat mendukung terjadinya proses pembelajaran yang efektif.
- f. Tercipta proses pembelajaran yang komprehensif dan kondusif mampu membentuk kompetensi, nilai-nilai sikap dalam kehidupan individual maupun grup.
- g. Pengakuan dari masyarakat pengguna (industri/dunia kerja) yang memberikan penghargaan dalam bentuk gaji yang sesuai dengan standar kemampuannya.
- h. Tumbuh dan berkembangnya wirausahawan muda dan berkembangnya peran serta masyarakat dalam peningkatan perekonomian.

Sementara itu, sasaran pengembangan pengelolaan pendidikan kecakapan hidup adalah:

- a. Merancang sistem pengelolaan atau manajemen pendidikan kecakapan hidup pada semua jenjang pendidikan (pra-sekolah, TK/SD, SMP, SMU/SMK).
- b. Merancang dan menerapkan sistem penghargaan finansial karir, materi kepada tenaga kependidikan dan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
- c. Menciptakan sistem layanan kependidikan (pedagogis) dan pelayanan sumber daya yang akan mendinamisasi penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
- d. Melakukan program kaji ulang pendidikan kecakapan hidup sejalan dengan perkembangan dan pergeseran yang terjadi di dunia kerja/dunia usaha.
- e. Merancang pendirian pusat sumber daya pada masing-masing kabupaten/kota.
- f. Melakukan pengembangan standar kompetensi, dan sertifikasinya.

4. Program Kegiatan

Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target nasional tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup

Program yang menjadi sarana untuk melaksanakan pendidikan keterampilan hidup adalah: Kursus Keterampilan dan Kejuruan; Kursus Masuk Desa; Pemagangan; Kelompok Belajar Usaha; Pelatihan Kewirausahaan; Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (termasuk untuk pencegahan HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, dan pendidikan kesehatan reproduksi); Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Program pendidikan kecakapan hidup yang dikembangkan tersebut tidak saja diarahkan untuk bekerja/memenuhi kebutuhan pasar kerja, dan usaha mandiri, tetapi juga mengembangkan berbagai kompetensi psikososial, yaitu: empati; kesadaran diri; komunikasi; hubungan Interpersonal;

pengambilan keputusan; pemecahan masalah; berpikir kreatif; mampu menanggulangi masalah-masalah emosional

Program kecakapan hidup yang dikembangkan tersebut diarahkan untuk (1) bekerja/memenuhi kebutuhan pasar kerja, dan (2) usaha mandiri. Bidang lapangan kerja dan lapangan usaha meliputi sector-sektor yang peluang kerja dan peluang usahanya terbuka antara lain: pertanian, perikanan, peternakan, kelautan, kehutanan, perkebunan, bangunan, produksi, perdagangan, hotel dan restoran, pertambangan, manufaktur, pabrikasi, transportasi, jasa-jasa, dan usaha lain yang berkembang di daerah.

b. Sumber Daya

Untuk memberikan akses pendidikan kecakapan hidup kepada penduduk usia sekolah, warga masyarakat diperlukan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut berupa dana, kelembagaan pendidikan kecakapan hidup, ketenagaan dan sarana belajar, dan manajemen yang baik.

Sumberdaya pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk berjalannya proses pendidikan kecakapan hidup meliputi semua institusi pendidikan yang relevan jenjang pendidikannya yang ada di masyarakat, sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup adalah:

- 1) Lembaga Kursus Pendidikan Nonformal/pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Diklusemas).
- 2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- 3) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)
- 4) Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI)
- 5) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- 6) Lembaga Pengembangan Terpadu Masyarakat (LPTM) seperti pondok pesantren, yayasan yang menangani pendidikan nonformal, dll.
- 7) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Perguruan Tinggi yang peduli pendidikan nonformal.
- 8) Organisasi kepemudaan, yayasan dan koperasi yang menangani pemuda.

c. Pengelolaan

Setidaknya ada 4 (empat) unsur yang terlibat langsung dalam pengelolaan program pendidikan kecakapan hidup. Keempat unsur tersebut adalah: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat Lokal. Pengelolaan program akan meliputi pelaksanaan fungsi: perencanaan, pelaksanaan program, koordinasi, pemantauan, pengendalian, dan penilaian.

Pengelolaan program pendidikan kecakapan hidup difokuskan pada pengelolaan pelayanan pendidikan dan pengelolaan sumber daya. Pengelolaan pendidikan berkaitan dengan: Pengembangan kurikulum; Pengembangan, produksi dan distribusi bahan belajar (buku dan modul); Bantuan teknis pengembangan kegiatan belajar; Pengelolaan pelatihan tenaga pendidik

Sedangkan pengelolaan sumber daya mengacu pada: Pengelolaan tenaga kependidikan; Pengelolaan sistem informasi; Pengelolaan partisipasi dan kontribusi dari masyarakat; Pengelolaan kegiatan sosialisasi, advokasi, dan evaluasi

Dalam kaitan dengan otonomi dan desentralisasi pendidikan, berbagai aturan dan pedoman pelaksanaan telah ditetapkan oleh Depdikbud, antara lain: (a) aturan mengenai urusan atau kewenangan dalam bidang pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (b) pedoman dan mekanisme untuk manajemen, akuntansi dan audit pembiayaan dan pendanaan pendidikan, (c) pedoman pengelolaan komite sekolah dan dewan pendidikan, (d) aturan mengenai otonomi perguruan tinggi.

Dalam menanggapi persoalan tersebut, dibutuhkan keputusan menteri baru untuk menjelaskan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan pada setiap tingkatan system termasuk formula pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Kebijakan Depdiknas juga dapat merencanakan untuk menentukan kerangka bagi pengembangan kinerja pemerintah daerah sebagai dasar bagi pengembangan strategi pembiayaan yang dapat membantu kinerja pendidikan pemerintah daerah yang bermutu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan pembenahan untuk melihat kembali peran dan fungsi serta urusan bidang pendidikan antara Kemendiknas, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembenahan

tersebut termasuk reformasi organisasi Kemendiknas, seperti yang telah dilakukan dengan pembentukan Direktorat Jenderal Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Upaya ini bertujuan ke arah perbaikan tentang struktur organisasi dengan meningkatkan tanggungjawab bagi pengembangan keijakan, pedoman strategis, penetapan standar dan monitoring kinerja. Sejalan dengan itu, perlu pula dilakukan pembenahan terhadap provinsi dan kabupaten/kota dengan cara :

- a. Penetapan tanggungjawab provinsi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan dan dukungan teknis.
- b. Penetapan tanggungjawab kabupaten/kota dalam pengelolaan yang strategis dan operasional termasuk pengelolaan dan perencanaan keuangan dalam jangka menengah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan implementasi piloting secara selektif dengan mengembangkan berbagai model pengembangan desentralisasi sejak beberapa tahun terakhir ini. Beberapa kabupaten/kota telah melakukan berbagai kebijakan yaitu: (a) penetapan formula mekanisme bantuan bagi perbaikan dan pengembangan sekolah, (b) memperkuat proses akuntabilitas dan school governance, (c) penetapan sistem keuangan dan perencanaan sekolah, (d) program pengembangan kapasitas pada level pemerintah pusat, kabupaten/kota, kecamatan dan satuan pendidikan. Kemendikbud perlu memperkuat pemetaan sekolah, termasuk sistem manajemen informasi.

BAB VI

PENDIDIKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Analisis Situasi dan Kondisi

1. Mekanisme Pelaksanaan Program

Perumusan program, kegiatan, dan perencanaan anggaran PUG di provinsi dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Pokja tersebut bekerja berdampingan dan berkoordinasi dengan kab/kota yang diamanatkan untuk menjamin strategi dan kebijakan pemerintah dalam pengarusutamaan gender, termasuk dalam bidang pendidikan. Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebijakan, program dan kegiatan pendidikan memberikan kesempatan dan manfaat yang sama untuk anak perempuan dan laki-laki. Komitmen untuk merumuskan program dan kegiatan yang responsif gender adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemerataan informasi tentang kesetaraan gender kepada semua lapisan masyarakat dan meningkatkan program advokasi dan program pendidikan KIE dengan perspektif gender.
- b. Meningkatkan sosialisasi pengarusutamaan gender dan peningkatan kepekaan, termasuk pengambilan keputusan dalam pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan program dan strategi.
- c. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan dalam rangka pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pada tingkat pusat dan daerah yang responsif gender.
- d. Menggunakan sistem informasi yang intensif dan implementasi pendidikan yang responsif gender, dan menganalisis data untuk mengetahui perencanaan dan kinerja pendidikan dalam perspektif gender padatingkat provinsi dan kota/kabupaten dalam rangka untuk memformulasi kebijakan dan program pendidikan yang responsif gender.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan Pusat Studi Wanita dalam mengatur melakukan studi kebijakan pendidikan yang berwawasan gender dalam rangka memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan

pendidikan yang responsif gender di provinsi dan kabupaten/kota.

- f. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan kajian tentang gender melalui program studi gender padatingkat Sarjana dan pasca sarjana di universitas yang memiliki Pusat Studi Wanita/Gender. Strategi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya peneliti-peneliti dan praktisi di bidang pendidikan yang responsif gender.
- g. Melaksanakan undang-undang, peraturan-peraturan, kurikulum, materi pembelajaran dan kebijakan pendidikan lainnya yang dapat mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
- h. Meningkatkan sistem informasi pendidikan yang berkesinambungan untuk menjamin implementasi program pendidikan yang responsif gender.
- i. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap pelaksanaan pendidikan yang responsif gender di pusat dan daerah.

2. Kinerja Pelaksanaan Program

Akses terhadap pendidikan berbasis kesetaraan dan keadilan gender telah berkembang secara bertahap semenjak keluarnya kebijakan tentang pengarusutamaan gender tahun 2001. Kesenjangan gender di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah tingkat atas telah menurun secara keseluruhan, baik di pedesaan maupun perkotaan.

a. Partisipasi Siswa pada PAUD (TK)

Program PAUD mulai dirasakan manfaatnya bagi para orangtua, terutama di daerah. Peningkatan angka partisipasi kasar terus membaik. Jika dilihat dalam perspektif gender, jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan seimbang. Dengan demikian, perbedaan gender (*gender parity*) dengan indeks perbedaan gender (*gender parity index*) yaitu 1,00 yang berarti sudah seimbang.

Tabel 6.1
Jumlah Siswa TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2012

No	Provins	2010/2011			2011/2012		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nanggroe Aceh Darussalam	38,393	36,577	74,970	43,237	35,988	79,225
2	Sumatera Utara	36,769	36,870	73,639	49,621	49,880	99,501
3	Sumatera Barat	36,106	36,245	72,351	48,309	48,497	96,806
4	RIAU	35,412	35,350	70,762	37,852	37,763	75,615
5	Jambi	20,216	19,499	39,715	26,628	21,343	47,971
6	Sumatera Selatan	26,374	26,299	52,673	30,110	30,024	60,134
7	Bengkulu	9,510	9,595	19,105	12,791	12,936	25,727
8	Lampung	44,991	45,107	90,098	52,429	52,562	104,991
9	Bangka Belitung	7,760	7,741	15,501	11,609	11,579	23,188
10	Kepulauan Riau	10,222	10,331	20,553	12,099	12,232	24,331
11	DKI Jakarta	67,540	57,106	124,646	67,985	57,484	125,469
12	Jawa Barat	140,384	139,984	280,368	156,326	155,876	312,202
13	Jawa Tengah	247,248	249,002	496,250	319,823	322,118	641,941
14	DI Yogyakarta	45,776	43,940	89,716	61,990	53,382	115,372
15	Jawa Timur	379,873	380,409	760,282	412,898	413,471	826,369
16	Banten	33,554	33,877	67,431	40,218	40,622	80,840
17	Bali	31,538	31,795	63,333	33,899	34,181	68,080
18	Nusa Tenggara Barat	28,585	29,305	57,890	32,349	29,714	62,063
19	Nusa Tenggara Timur	22,381	23,188	45,569	28,150	24,573	52,723
20	Kalimantan Barat	13,633	13,779	27,412	15,905	16,075	31,980
21	Kalimantan Tengah	19,277	19,278	38,555	23,682	23,683	47,365
22	Kalimantan Selatan	38,418	38,558	76,976	47,826	47,997	95,823
23	Kalimantan Timur	26,571	26,585	53,156	30,129	30,145	60,274
24	Sulawesi Utara	19,113	19,360	38,473	34,906	27,500	62,406
25	Sulawesi Tengah	20,300	20,230	40,530	31,217	26,432	57,649
26	Sulawesi Selatan	57,664	56,958	114,622	76,758	75,769	152,527
27	Sulawesi Tenggara	21,883	21,661	43,544	27,824	27,585	55,409
28	Gorontalo	15,817	14,744	30,561	17,047	16,915	33,962
29	Sulawesi Barat	9,990	9,952	19,942	12,128	12,081	24,209
30	Maluku	6,938	6,819	13,757	9,443	8,865	18,308
31	Maluku Utara	5,113	5,167	10,280	6,459	6,472	12,931
32	Papua Barat	5,006	4,955	9,961	5,563	5,516	11,079
33	Papua	11,838	11,918	23,756	13,939	12,032	25,971
	Indonesia	1,534,193	1,522,184	3,056,377	1,831,149	1,781,292	3,612,441

Sumber: PDSP Kemdikbud 2011 & 2012

b. Partisipasi Siswa SD/MI dalam Perspektif Gender

Partisipasi pendidikan dilihat dari 3 kategori yaitu: Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Selama tahun 2011 – 2012 menunjukkan bahwa persentase siswa baru kelas1 SD terhadap anak usia 7 tahun (Angka Masukan Kasar) anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan.

Selama tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa persentase siswa SD/MI terhadap anak kelompok usia 7-12 tahun (Angka Partisipasi Kasar) anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan.

Tabel 6.2
Jumlah Siswa SD/MI Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011--2012

No	Provinsi	2010/2011			2011/2012		
		Laki- laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	NAD	277,598	269,909	547,507	282,372	264,418	546,790
2	Sumatera Utara	925,649	925,754	1,851,403	952,839	895,693	1,848,532
3	Sumatera Barat	353,911	337,019	690,930	359,382	329,458	688,840
4	RIAU	372,963	360,756	733,719	381,844	353,569	735,413
5	Jambi	211,989	215,549	427,538	217,358	204,530	421,888
6	Sumatera Selatan	488,853	467,908	956,761	489,540	468,465	958,005
7	Bengkulu	125,496	120,340	245,836	125,137	118,452	243,589
8	Lampung	538,297	491,348	1,029,645	524,573	493,290	1,017,863
9	Bangka Belitung	74,183	72,160	146,343	75,610	72,032	147,642
10	Kepulauan Riau	83,089	80,010	163,099	86,825	83,969	170,794
11	DKI Jakarta	420,096	416,934	837,030	429,372	408,503	837,875
12	Jawa Barat	2,378,241	2,357,197	4,735,438	2,455,200	2,343,796	4,798,996
13	Jawa Tengah	1,703,541	1,703,951	3,407,492	1,750,401	1,632,669	3,383,070
14	DI Yogyakarta	155,062	149,840	304,902	157,182	147,975	305,157
15	Jawa Timur	1,657,820	1,651,703	3,309,523	1,715,390	1,589,515	3,304,905
16	Banten	649,302	654,712	1,304,014	655,327	619,069	1,274,396
17	Bali	211,340	209,331	420,671	218,593	203,072	421,665
18	NTB	289,912	279,511	569,423	287,336	272,590	559,926
19	NTT	400,742	388,479	789,221	410,189	385,960	796,149
20	Kalimantan Barat	333,475	316,992	650,467	337,029	318,902	655,931
21	Kalimantan Tengah	170,092	159,079	329,171	167,867	160,565	328,432
22	Kalimantan Selatan	214,982	205,452	420,434	218,288	202,734	421,022
23	Kalimantan Timur	217,249	213,761	431,010	226,281	211,004	437,285
24	Sulawesi Utara	141,539	135,916	277,455	144,435	135,737	280,172
25	Sulawesi Tengah	185,768	178,869	364,637	185,361	176,200	361,561
26	Sulawesi Selatan	524,959	520,059	1,045,018	536,497	505,071	1,041,568

No	Provinsi	2010/2011			2011/2012		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
27	Sulawesi Tenggara	177,335	178,574	355,909	178,187	170,513	348,700
28	Gorontalo	85,025	80,860	165,885	84,487	82,188	166,675
29	Sulawesi Barat	93,881	88,387	182,268	91,612	88,659	180,271
30	Maluku	138,468	134,124	272,592	139,105	132,923	272,028
31	Maluku Utara	86,420	84,409	170,829	84,489	88,684	173,173
32	Papua Barat	62,049	59,240	121,289	61,924	60,195	122,119
33	Papua	168,633	154,123	322,756	180,790	152,697	333,487
	Indonesia	13,917,959	13,662,256	27,580,215	14,210,822	13,373,097	27,583,919

Sumber: PDSP Kemdikbud 2011&2012

Selama tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa persentase siswa SD kelompok usia 7-12 tahun terhadap anak kelompok usia 7-12 tahun (Angka Partisipasi Murni) anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan. Peningkatan partisipasi anak laki-laki lebih tinggi dibanding dengan peningkatan partisipasi anak perempuan pada jenjang SD. Bahkan terjadi penurunan proporsi anak perempuan kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD.

c. Partisipasi Siswa SMP/MTs dalam Perspektif Gender

Peserta didik untuk jenjang SMP/MTs terus meningkat selama kurun waktu 2010-2011 menunjukkan bahwa persentase siswa SMP/MTs terhadap anak kelompok usia 13-15 tahun (Angka Partisipasi Kasar) anak laki-laki lebih rendah dibanding anak perempuan. Peningkatan partisipasi anak laki-laki lebih tinggi dibanding dengan peningkatan partisipasi anak perempuan ke jenjang SMP/MTs. Bila dilihat Indeks Paritas Gender (IPG) APK SMP/MTs dalam kurun waktu yang sama menunjukkan sedikit kenaikan. IPG sebesar itu menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender masih belum tercapai.

Tabel 6.3
Jumlah Siswa SMP/MTs Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2012

No	Kab/Kota	2010/2011			2011/2012		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nanggroe Aceh Darussalam	107,368	103,231	210,599	102,851	98,889	201,740
2	Sumatera Utara	335,285	318,201	653,486	321,485	305,036	626,521
3	Sumatera Barat	111,662	115,520	227,182	101,904	105,649	207,553
4	RIAU	106,303	101,847	208,150	114,293	110,038	224,331
5	Jambi	60,148	58,961	119,109	60,707	59,605	120,312
6	Sumatera Selatan	156,987	149,283	306,270	165,578	157,456	323,034
7	Bengkulu	43,723	42,105	85,828	43,628	42,004	85,632
8	Lampung	161,339	158,049	319,388	158,204	154,580	312,784
9	Bangka Belitung	21,638	22,177	43,815	22,927	23,502	46,429
10	Kepulauan Riau	29,718	29,797	59,515	29,892	29,979	59,871
11	DKI Jakarta	194,811	189,423	384,234	174,201	169,393	343,594
12	Jawa Barat	790,500	778,960	1,569,460	833,325	822,332	1,655,657
13	Jawa Tengah	658,660	630,958	1,289,618	615,631	587,798	1,203,429
14	DI Yogyakarta	68,201	64,878	133,079	63,986	60,730	124,716
15	Jawa Timur	622,049	595,283	1,217,332	621,034	593,402	1,214,436
16	Banten	201,000	189,960	390,960	199,760	189,128	388,888
17	Bali	90,180	83,255	173,435	91,233	86,229	177,462
18	Nusa Tenggara Barat	85,118	80,736	165,854	90,149	85,488	175,637
19	Nusa Tenggara Timur	111,970	109,687	221,657	133,035	130,419	263,454
20	Kalimantan Barat	96,769	93,736	190,505	99,278	96,003	195,281
21	Kalimantan Tengah	44,348	42,781	87,129	44,433	42,693	87,126
22	Kalimantan Selatan	55,572	51,096	106,668	55,078	50,632	105,710
23	Kalimantan Timur	72,737	70,136	142,873	80,056	77,142	157,198
24	Sulawesi Utara	59,818	59,582	119,400	55,573	55,450	111,023
25	Sulawesi Tengah	51,285	49,847	101,132	59,035	57,439	116,474
26	Sulawesi Selatan	170,246	167,083	337,329	191,879	187,893	379,772
27	Sulawesi Tenggara	58,742	56,405	115,147	60,784	58,471	119,255
28	Gorontalo	21,905	21,143	43,048	22,757	21,974	44,731
29	Sulawesi Barat	24,720	24,329	49,049	29,323	28,688	58,011
30	Maluku	46,166	44,731	90,897	46,088	44,681	90,769
31	Maluku Utara	24,316	23,589	47,905	30,887	28,931	59,818
32	Papua Barat	19,440	18,531	37,971	20,494	19,370	39,864
33	Papua	51,513	46,917	98,430	54,865	49,959	104,824
	Indonesia	4,754,237	4,592,217	9,346,454	4,794,353	4,630,983	9,425,336

Sumber: PDSP Kemdikbud 2011&2012

d. Perkembangan Guru menurut Jenis Kelamin

Apabila diamati berdasarkan jenjang pendidikan nampak terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka partisipasi perempuan semakin sedikit.

Tabel 6.4
Perkembangan Guru Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2011

Nomor	Jenis Sekolah	2010/2011	2011/2012
1	Guru TK		
	Laki-laki	5,278	5,294
	Perempuan	192,972	199,112
	% Laki-laki	198,250	204,406
	% Perempuan	2.66	2.59
	IPG	97.34	97.41
2	Guru SD		
	Laki-laki	531,603	488,812
	Perempuan	969,633	914,638
	% Laki-laki	1,501,236	1,405,461
	% Perempuan	35.41	34.78
	IPG	64.59	65.08
3	Guru SMP		
	Laki-laki	223,415	199,771
	Perempuan	303,200	282,493
	% Laki-laki	526,615	482,264
	% Perempuan	42.42	41.42
	IPG	57.58	58.58
4	Guru SMA		
	Laki-laki	112,154	111,738
	Perempuan	141,176	141,120
	% Laki-laki	253,330	252,858
	% Perempuan	44.27	44.19
	IPG	55.73	55.81
5	Guru SMK		
	Laki-laki	84,884	83,921
	Perempuan	81,608	81,479
	% Laki-laki	166,492	165,400
	% Perempuan	50.98	50.74
	IPG	49.02	49.26

Sumber: PDSP Kemdikbud

3. Analisis Pelaksanaan Program

Keseluruhan perkembangan di dalam indikator pemerataan dan keadilan gender pada semua tingkat sistem perlu dilihat variasi pelaksanaan dan capainnya. Khususnya terkait dengan variasi capaian yang terjadi pada tingkat kabupaten/kota. Dalam beberapa kasus, perempuan masih menempatkan peran strategis yang dibutuhkan untuk menjamin pemerataan gender, dan terkait dengan adat-istiadat dan budaya lokal, menempatkan laki-laki agar dapat lebih berperan dalam rangka pemerataan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pelaksanaan program pendidikan.

Di kab/kota yang IPG tinggi, strategi-strategi perlu disusun adalah menjamin agar anak laki-laki mau masuk sekolah, dan menangani permasalahan pembiayaan langsung yang berkaitan dengan mendapatkan pekerjaan. Dalam kab/kota dengan IPG rendah, permasalahan jarak tempuh ke sekolah (permasalahan keselamatan perempuan) dan ketentuan infrastruktur sekolah (contohnya pemisahan toilet dan kebersihan) perlu ditangani dan harus direspon dengan segera.

B. Hasil Pelaksanaan Program

1. Kebijakan Nasional

Upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender telah sejak tahun 2000 digulirkan. Hal ini ditandai oleh lahirnya payung hukum kebijakan berupa Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Di bidang pendidikan, payung hukum kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun demikian, implementasi PUG di bidang pendidikan, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional telah dimulai sejak tahun 2002.

Program utama yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) terhadap para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan, para perencana bidang pendidikan, para penulis buku/bahan ajar, para kepala/pimpinan satuan pendidikan, para tenaga pendidik dan kependidikan, dan *stakeholders* pendidikan lainnya. Pada tahap awal,

penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan di tingkat pemerintah pusat, yaitu di 7 unit utama Kementerian Pendidikan Nasional. Mulai tahun 2003 pemerintah pusat bekerja sama dengan Pokja Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan di 33 provinsi mulai mengembangkan model implementasi PUG bidang pendidikan di provinsi..

Kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan telah menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Nasional sejak 2002. Hal ini merupakan wujud dari komitmen internasional yang telah dituangkan dalam *The International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7/1984. Komitmen Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender juga mengacu pada komitmen internasional tentang *Education for All* (EFA) yang tertuang dalam Kesepakatan Dakar, yaitu:

- a. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.
- b. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.
- c. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (*life skills*) yang sesuai.
- d. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
- e. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.

- f. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (*life skills*) yang penting.

Untuk menjamin pencapaian target-target PUG Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut : (1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan, (2) peningkatan mutu dan relevansi, menurunkan tingkat keaksaraan penduduk dewasa terutama penduduk perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap jenjang pendidikan baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah, pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk dewasa, dan (3) tata kelola dan akuntabilitas, meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan yang berwawasan gender.

2. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan

Tantangan perluasan peluang ditingkat pendidikan menengah dan tinggi adalah meningkatkan keadilan gender dalam akses pendidikan dan mengupayakan kebersinambungan. Strategi utama yang dilakukan meliputi: (a) lokasi dan desain sekolah, menjamin akses yang merata dan adil, ketersediaan sarana sanitasi bagi anak perempuan dan kondisi yang aman bagi mereka yang tinggal cukup jauh dari sekolah; (b) kampanye penumbuhan kesadaran akan sensitifitas gender yang menitikberatkan pentingnya pendidikan (dasar, menengah dan tinggi) dengan memperhatikan biaya pendidikan (yang riil atau proyeksi) yang bervariasi sesuai konteks lingkungan; (c) usaha-usaha terukur untuk mengurangi stereotip gender dalam pemilihan jurusan di sekolah menengah atau perguruan tinggi, sehingga jurusan teknologi misalnya menjadi pilihan siswa perempuan dan jurusan pendidikan guru dan ilmu-ilmu sosial menjadi pilihan siswa laki-laki.

Selanjutnya strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Menjamin Perencanaan Pengembangan Sekolah dan Materi Pembelajaran yang Sensitif Gender. Strategi utama yang dilakukan adalah: (a) dengan menggunakan data disagregasi/terpilah (misalnya; angka partisipasi siswa, hasil ujian dan lain-lain), kepala sekolah dan

komite sekolah menyusun kegiatan/program pengembangan sekolah yang memperhatikan kesetaraan kesempatan bagi siswa laki-laki dan perempuan; (b) menjamin keberadaan wakil perempuan (para ibu) dalam keanggotaan komite sekolah dan perannya yang nyata, dapat diupayakan pelatihan tentang tata kelola sekolah bagi para ibu tersebut; (c) menjamin tidak adanya stereotipe gender tampilan dan pemilihan buku teks bahkan buku teks tersebut membawa pesan positif tentang peran perempuan yang setara.

- b. Menjamin Pengembangan Tenaga Pendidik yang Sensitif Gender: meningkatkan keterwakilan kaum perempuan dalam posisi manajemen di lembaga pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi utamanya adalah: (1) perumusan rencana aksi dan tujuan yang akan diraih dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender; (2) menjamin pelaksanaan Undang-Undang peningkatan mutu guru dan program kerja sama yang memfasilitasi kesamaan akses dan memperhatikan kepentingan kaum perempuan; (3) mengembangkan strategi penyiapan calon-calon pimpinan sekolah dari kaum perempuan antara lain memberikan prioritas bagi kaum perempuan untuk memperoleh kualifikasi S1/D4; (iv) program pengembangan dan pembinaan pegawai di tingkat provinsi/kabupaten/kota pada lembaga-lembaga pendidikan lebih ditekankan peningkatan jumlah perempuan untuk menduduki posisi penting dalam manajemen, perencanaan, informasi, dan keuangan.
- c. Menjamin strategi perencanaan program sensitif gender, seperti BOS Buku, Sertifikasi dan peningkatan mutu guru, pengembangan infrastruktur sekolah, pelatihan manajemen sekolah, program perluasan dan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya. Semua program di atas di desain dan dilaksanakan dalam rangka pencapaian keadilan dan kesetaraan gender. Strategi utama yang dikembangkan antara lain: (1) menata mekanisme proses program gender yang bersifat lintas instansi; (2) menjamin ketersediaan data terpilah berdasarkan gender untuk keperluan monitoring pengaruh dan kemajuan program tersebut, dan (3) menetapkan program evaluasi yang sensitif gender di mana setiap masalah ketidakadilan dan kesetaraan gender menjadi bagian yang penting dalam pembaharuan strategi dan penyesuaian program.

3. Sasaran dan Target Capaian

Sasaran pendidikan berwawasan gender pada tahun 2011 adalah meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah yang diikuti dengan semakin seimbang rasio siswa laki-laki dan perempuan. Di samping itu partisipasi penduduk miskin laki-laki dan perempuan yang masih rendah perlu ditingkatkan sehingga menjadi setara dengan penduduk dari kelompok kaya. Meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk yang berusia di atas usia sekolah dalam pendidikan dasar dan menengah juga menjadi sasaran yang harus dicapai.

4. Program dan Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target PUG tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyebaran informasi pendidikan kesetaraan gender pada seluruh lapisan masyarakat.
- b. Peningkatan program advokasi dan KIE program pendidikan berwawasan gender, peningkatan sosialisasi gender mainstreaming.
- c. Peningkatan komitmen para pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan website dan jaringan internet pendidikan.
- d. Peningkatan jejaring kerja pengarusutamaan gender antarsektor di tingkat kabupaten dan provinsi.
- e. Peningkatan kerjasama LSM dengan LSM dan organisasi perempuan peduli pendidikan untuk memberikan fasilitasi kepada keluarga /orangtua yang kurang mampu untuk memberikan hak setiap anak dalam memperoleh pendidikan.
- f. Peningkatan sosialisasi Gender Mainstreaming kepada para pelaku dan pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
- g. Membangun komitmen para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang responsif gender.
- h. Meningkatkan peran media massa untuk pendidikan sebagai alat bagi para pendidik, pemerintah, maupun LSM untuk memajukan perempuan dan pembangunan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar.

- i. Mengembangkan pusat-pusat studi wanita baru atau memperluas cakupan pusat-pusat studi yang telah ada di tingkat kabupaten/kota atau dengan isu gender sebagai mitra pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan berwawasan gender.
- j. Melakukan berbagai studi mengenai praktek-praktek yang menyebabkan terjadinya pendidikan yang tidak responsif gender dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diusulkan.
- k. Peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana dan penganggaran pendidikan keluarga berwawasan gender bagi keluarga miskin.
- l. Peningkatan pendidikan keluarga berwawasan gender bagi keluarga miskin di beberapa daerah perkotaan dan pedesaan terpilih.
- m. Mengevaluasi dan menyempurnakan konsep pendidikan keluarga berwawasan gender.

BAB VII

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

A. Analisis Situasi dan Kondisi

1. Mekanisme pelaksanaan Program

Mekanisme pelaksanaan dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan terdiri atas:

- a. Implementasi dan Sosialisasi Standar Pendidikan Nasional (SPN), disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Penguatan pengendalian kualitas pendidikan melalui standard kompetensi lulusan, ujian sebagai alat pengendali mutu, akreditasi sekolah dan survei-survei keaksaraan, ilmiah dan matematika, disusun oleh BSNP dan Badan Akreditasi Nasional dan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- c. Penguatan dan pengembangan pendidikan anak usia dini, formal dan nonformal melalui rehabilitasi layanan pendidikan mencakup penetapan standar minimum, mutu guru, dan fasilitas buku teks.
- d. Pengembangan implementasi proses peningkatan mutu melalui manajemen berbasis sekolah, manajemen waktu pelaksanaan program, supervisi mata pelajaran, di bawah kordinasi dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.
- e. Peningkatan komitmen dan kesadaran stakeholder pendidikan didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- a. Strategi dan program di atas diimplementasikan di sekolah-sekolah yang dikoordinasikan oleh Kemdiknas dan Kemenag, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

2. Kinerja Pelaksanaan Program

Dengan telah diterbitkan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Terdapat 8

standar pendidikan yang harus disusun dan ditetapkan untuk diimplementasikan pada setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal. Selanjutnya, dalam rangka mengukur pemenuhan standar nasional pendidikan pada setiap satuan, maka dibentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN) yaitu BAN Pendidikan Tinggi (BAN PT), BAN Sekolah/Madrasah (BANS/M), dan BAN Pendidikan Nonformal (BAN PNF).

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, salah satu komponen terpenting adalah guru. Untuk itu, dikeluarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peran dan kedudukan guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Sesungguhnya, rasio guru dan siswa di Indonesia sudah ideal yaitu rata-rata untuk setiap 15-19 orang siswa di lembaga pendidikan formal-persekolahan dapat ditangani oleh seorang guru. Sementara itu, untuk pendidikan nonformal (Paket A, B, Pemberantasan Buta Aksara), satu orang guru/tutor rata-rata melayani 12-17 orang.

Sementara itu, guru yang memiliki kewenangan mengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan kualifikasi juga disinergikan dengan peningkatan kompetensi dan uji sertifikasi guru.

Tabel 7.1
Perkembangan Rasio Siswa Terhadap Guru Tahun 2010-2011

No	Jenjang Pendidikan	Rasio Siswa/Guru	
		2010	2011
	Formal		
1	TK	15	15
2	SD	17	18
3	SMP	15	17
4	SM	12	18

Sumber: PDSP Kemdikbud

Latar belakang pendidikan dan penguasaan mata pelajaran para guru perlu ditingkatkan terutama guru yang menguasai mata pelajaran matematika, sains, dan sejarah (mata pelajaran utama dalam kurikulum) sangat terbatas.

Tabel 7.2
Sertifikasi Guru Per Provinsi Tahun 2010--2011

No	Provinsi	2010	2011
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2,910	7,678
2	Sumatera Utara	6,262	19,634
3	Sumatera Barat	5,992	8,951
4	RIAU	3,275	3,997
5	Jambi	2,748	4,638
6	Sumatera Selatan	6,219	8,560
7	Bengkulu	1,488	2,842
8	Lampung	6,228	9,005
9	Bangka Belitung	693	1,152
10	Kepulauan Riau	1,034	1,192
11	DKI Jakarta	8,201	9,690
12	Jawa Barat	29,556	37,743
13	Jawa Tengah	26,142	29,727
14	DI Yogyakarta	6,662	3,459
15	Jawa Timur	33,933	42,120
16	Banten	4,485	8,122
17	Bali	3,104	6,468
18	Nusa Tenggara Barat	1,886	5,598
19	Nusa Tenggara Timur	1,755	7,789
20	Kalimantan Barat	2,199	6,213
21	Kalimantan Tengah	909	4,085
22	Kalimantan Selatan	3,899	5,201
23	Kalimantan Timur	2,157	5,737
24	Sulawesi Utara	3,383	3,585
25	Sulawesi Tengah	2,188	2,862
26	Sulawesi Selatan	8,969	10,959
27	Sulawesi Tenggara	2,942	3,672
28	Gorontalo	1,107	816
29	Sulawesi Barat	935	959
30	Maluku	1,590	1,525
31	Maluku Utara	390	1,309
32	Papua Barat	269	856
33	Papua	632	1,785
	Indonesia	184,142	267,929

Sumber: BPSDPMK dan PMP Kemdikbud

Upaya mengatasi itu, pemerintah terus berupaya melakukan beberapa strategi dan program utama yaitu: (a) semua guru dan pengelola sekolah,

paling rendah berkualifikasi S1 dan D4 serta memiliki sertifikat kompetensi yang relevan; (b) peningkatan kualifikasi guru yang dilakukan oleh universitas yang telah terakreditasi; (c) pengenalan sistem pendistribusian pendidikan guru yang inovatif, (kluster sekolah dan dukungan kabupaten/kota), dan (d) pemberian insentif berbasis kinerja bagi para guru terkait dengan kualifikasi professional serta keinginan bekerja di daerah-daerah terpencil. Program ini sedang dilaksanakan, dengan tahapan-tahapan implementasi yang tercermati.

Tabel 7.3
Perkembangan Rasio Siswa Per Kelas Tahun 2010—2011

No	Jenjang Pendidikan	Rasio Siswa/kelas	
		2010	2011
	Formal		
1	TK	20	19
2	SD	27	26
3	SMP	36	34
4	SM	36	37

Sumber: PDSP Kemdikbud

Secara umum, prestasi siswa yang tergambar melalui angka rata-rata ujian nasional telah mengalami peningkatan yang berarti baik di SMP dan SMA. Kesenjangan prestasi siswa antara sekolah binaan Kemdiknas dan Depag juga semakin menyempit.

Tabel 7.4
Jumlah Lulusan SD, SMP, dan SM Tahun 2010/2011 dan 2011/2012

No	Jenjang Pendidikan	2010/2011 & 2011/2012			
		Jumlah Peserta	Lulus (%)	Jumlah Peserta	Lulus (%)
1	SD	4,026,171	97.95	4,162,114	99.26
2	SMP	2,952,044	99.39	3,648,321	98.74
3	SM	2,220,458	95.61	1,642,985	97.60

Sumber:PDSP Kemdikbud

Indikator lain peningkatan standar dan mutu pendidikan adalah kenaikan angka kelulusan Ujian Nasional selama tahun 2010-2011. Walaupun standar minimum kelulusan selalu dinaikan pada setiap tahunnya, tetapi jumlah siswayang lulus Ujian Nasional selalu meningkat.

Secara umum kabupaten/kota yang memiliki ujian nasional rendah merupakan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya yang terkait dengan pendanaan operasional, ketersediaan guru dan pengelola pendidikan yang bermutu. Kondisi di atas terjadi karena adanya hambatan penyediaan guru matematika dan ilmu pengetahuan yang mau mengajar di kabupaten/kota.

Kemajuan yang berarti terkait dengan peningkatan mutu pendidikan adalah penetapan standar dan akreditasi sekolah. Standar minimum kinerja sekolah dan input pendidikan yang relevan telah ditetapkan pada 2004. Kapasitas akreditasi sekolah diperluas dengan berdirinya Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BANS/M) tingkat Nasional dan BAP Provinsi.

Tabel 7.6
Jumlah Sekolah Yang Terakreditasi Tahun 2010-2011

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	Jumlah
1	TK	158	7.948	8.106
	RA	348	2.609	2.957
2	SD	12.451	25.118	37.569
	MI	2.612	5.049	7.661
3	SMP	3.696	5.735	9.341
	MTs	1.162	2.645	3.807
4	SM	4.515	6.974	11.489
	MA	1.220	1.478	2.698

Sumber: Badan Akreditasi S/M Kemdikbud

3. Analisis Pelaksanaan Program

Berdasarkan paparan kinerja pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan sampai tahun 2011/2012 maka dapat dilakukan analisis dan identifikasi kebutuhan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis dengan

membagi pada dua besaran analisis yaitu *analisis lingkungan internal* (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman).

Analisis lingkungan internal merupakan upaya untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program-program yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan *analisis eksternal* merupakan upaya untuk memahami peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan baik nonformal dan informal sehingga tingkat keberhasilannya dapat diprediksi secara tepat.

Kondisi dan keberhasilan pelaksanaan program peningkatan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Adapun kekuatan dari pelaksanaan program peningkatan mutu ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti :

- a. Komitmen pemerintah dan dukungan legislatif sangat baik dalam penyelenggaraan program peningkatan mutu pendidikan. Hal ini terkait dengan adanya target dan indikator keberhasilan Program Pendidikan dalam MDGs dan HDI.
- b. Adanya semangat yang tinggi dari para keluarga baik di perkotaan maupun pedesaan untuk memprioritaskan pendidikan.
- c. Adanya bantuan dana (*blockgrant*) kepada sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dasar nonformal (Paket A/Paket B) untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.
- d. Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita, perguruan tinggi, dan lain-lain, yang sepenuhnya memberikan dukungan bagi keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan di Provinsi

Sementara itu beberapa kelemahan yang terlihat dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Mutu Input

Faktor utama yang cukup mempengaruhi mutu masukan (input) adalah ketersediaan guru, kesesuaian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, serta kemampuan guru secara umum masih jauh dari yang diharapkan.

b. Mutu Output

Dengan menggaris bawahi bahwa NEM bukan satu-satunya tolak ukur dalam menentukan mutu output, namun dari hasil paparan di atas menunjukkan bahwa secara akademis, tingkat penguasaan materi pada umumnya masih kurang. Walaupun di sisi lain sudah banyak siswa yang berprestasi. Disamping itu, tampak pula bahwa sebagian besar sekolah terutama di wilayah pedalaman atau pedesaan tergolong dalam klasifikasi kurang dan kurang sekali.

c. Mutu Outcome

Dari hasil analisis di atas, belum cukup memberi gambaran keberhasilan proses pendidikan dalam mempersiapkan lulusannya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, mengingat tidak adanya kriteria kelulusan sebagai prasyarat untuk melanjutkan, dan banyaknya faktor yang mempengaruhi. Sedangkan pendidikan kursus/pelatihan kerja belum sepenuhnya mampu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap kepada masyarakat untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Analisis lingkungan eksternal dapat dirumuskan beberapa peluang dan tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program-program di bidang peningkatan mutu pendidikan. Adapun peluangnya adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya mengimplementasikan Undang-Undang Guru dengan prioritas utama peningkatan profesionalisme guru melalui: (1) finalisasi target dan rencana aksi bertahap yang meliputi strategi penguatan kelembagaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa, (2) penguatan kapasitas perguruan tinggi terpilih dan lembaga lainnya dalam program desentralisasi layanan pendidikan dan proses akreditasi dan sertifikasi, (3) pengembangan manajemen guru dan layanan informasi guna memantau kemajuan pelaksanaan, (4) mengukur kelayakan dan pengembangan efisiensi pelatihan dan penempatan guru agar menjamin penetapan jumlah gaji dan honor yang sesuai dan tepat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana semua program ini dapat dilaksanakan secara efektif di setiap

tingkat mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga desa.

- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjamin Efektivitas Pelaksanaan Program BOS Buku dengan prioritas bagaimana memastikan bahwa program BOS Buku memberi pengaruh positif terhadap peningkatan dan standar mutu pendidikan. Tantangannya adalah bagaimana melakukan penguatan sistem monitoring, akuntansi, dan audit di berbagai tingkatan agar dana operasional yang dikeluarkan tepat dan tepat guna dan bagaimana penguatan manajemen sekolah/ kapasitas tata kelola dilakukan secara efektif sehingga pemanfaatan dana sesuai dengan target pengembangan sekolah.
- c. Pemerintah juga telah melakukan Penguatan Tata Kelola Berorientasi Mutu dan Mekanisme Akuntabilitas. Peningkatan mutu jelas membutuhkan kombinasi strategi *supply and demand*. Tantangannya adalah bagaimana memperkuat *demand side* seperti penguatan standar dan sistem monitoring dan evaluasi, supervisi dari kabupaten, untuk memberi informasi kepada DPRD dan Komite Sekolah serta pemangku kepentingan lainnya untuk digunakan dalam usaha meninjau pendekatan yang telah dilakukan, dan mekanisme yang paling efektif terhadap peninjauan variasi prestasi siswa/kinerja sekolah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah untuk dijadikan sebagai alat ukur perbaikan dan untuk kebutuhan strategi penyeimbangan pembiayaan.

Adapun tantangan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kapasitas akreditasi sekolah saat ini telah diperluas dengan berdirinya Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M) tingkat nasional dan BAP Provinsi. Sejak berdirinya lembaga ini telah terjadi peningkatan jumlah sekolah yang terakreditasi. Namun demikian tantangan yang harus dihadapi pun tidak kecil yaitu bagaimana setiap sekolah yang telah terakreditasi tersebut dapat terus mempertahankan kualitasnya bukan hanya dilihat dari infrastruktur namun juga sarana dan sumber daya manusianya.
- b. Pemerintah dengan didukung oleh lembaga internasional telah melakukan serangkaian penguatan kelembagaan terkait dengan program peningkatan mutu pendidikan yaitu (1) mengadakan pelatihan bagi kepala sekolah, tata

kelola manajemen komite sekolah di seluruh Indonesia, (2) menyusun panduan pelaksanaan manajemen berbasis hasil (*result-based management*) di sekolah-sekolah, (3) membuat peraturan perundang-undangan yang memuat kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah dan komite sekolah. Tantangannya adalah bagaimana seluruh program dan kegiatan ini dapat dipantau dan dievaluasi secara efektif di seluruh Indonesia yang tentunya juga memerlukan panduan pemantauan dan evaluasi serta indikator kunci keberhasilan dari masing-masing kegiatan.

- c. Di tahun 2000, buku teks sekolah dasar dan menengah tidak disediakan di sekolah. Namun dalam lima tahun terakhir ini, pemerintah telah menerapkan program BOS di seluruh Indonesia termasuk pemberian buku teks kepada keluarga sangat miskin. Tantangannya adalah bagaimana dampak pemberian dana BOS ini terhadap mutu pendidikan juga bagaimana ketersediaan buku teks di tahun-tahun selanjutnya.

B. Hasil Pelaksanaan Program

1. Kebijakan Nasional

Komitmen Dakar yang berkaitan dengan mutu pendidikan menitik-beratkan pada: (a) peningkatan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) pendidikan mencakup kinerja siswa dan sekolah dan peningkatan mutu lulusan, yang dapat dilihat antara lain melalui jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, (b) peningkatan ketersediaan input pendidikan yang berorientasi mutu, terutama materi pengajaran, guru bermutu dan sistem pengawasan dan (c) peningkatan sistem penjaminan mutu, mencakup penetapan standar–standar input termasuk infrastruktur.

Peningkatan mutu pendidikan yang diberikan kepada semua peserta didik dan peningkatan itu tercermin pada ukuran-ukuran *outcome* yang dapat diandalkan. Beberapa aspek utama dalam penilaian mutu pendidikan antara lain kemampuan membaca, menulis dan berhitung, serta keterampilan utama untuk hidup (*essential life skills*).

Mengacu pada komitmen Dakar, pemerintah telah melakukan beberapa strategi khusus:

- a. Peningkatan kinerja siswa dan sekolah, melalui: (1) penguatan sistem ujian dan sistem akreditasi, (2) penetapan aturan-aturan kelembagaan

dalam penyusunan standar dan tata kelola melalui reformasi undang-undang, peraturan dan organisasi, (3) penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam implementasi sistem monitoring kinerja tersebut.

- b. Peningkatan ketersediaan input pendidikan yang berorientasi mutu melalui, (1) penetapan standar minimum bagi input-input pendidikan yang mencakup infrastruktur, materi pengajaran dan guru bermutu, (2) penyusunan panduan pembiayaan dan manajemen bagi penyediaan input-input tersebut dan manajemen sumber daya terkait di tingkat sekolah.
- c. Penguatan sistem penjaminan mutu dan penguatan dan kelembagaan melalui: (1) revitalisasi peran dan tanggungjawab guna penyusunan standar pendidikan dan monitoring, mencakup peningkatan otonomi bagi organisasi pemantau standar-standar pendidikan, (2) revitalisasi peran dan tanggungjawab guna penjaminan mutu guru dan tenaga pendidik, mencakup perbaikan susunan dan pengaturan organisasi di tingkat pusat, (3) peningkatan otonomi pengelola dan komite sekolah guna pengelolaan sumber daya dan penyusunan laporan hasil prestasi siswa dan kinerja sekolah.

2. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan

Beberapa strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan provinsi adalah:

- a. Upaya implementasi Undang-Undang Guru: Prioritas utama adalah melaksanakan UU guru dan peningkatan profesionalisme guru melalui: (1) finalisasi target dan rencana aksi bertahap yang meliputi strategi penguatan kelembagaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa; (2) penguatan kapasitas perguruan tinggi terpilih dan lembaga lainnya dalam program desentralisasi layanan pendidikan dan proses akreditasi dan sertifikasi; (3) pengembangan manajemen guru dan layanan informasi guna memantau kemajuan pelaksanaan, dan (4) mengukur kelayakan dan pengembangan efisisensi pelatihan dan penempatan guru agar menjamin penetapan jumlah gaji dan honor yang sesuai dan tepat.
- b. Menjamin Efektivitas Pelaksanaan Program BOS Buku: Prioritas kedua adalah bagaimana memastikan bahwa program BOS Buku member

pengaruh positif terhadap peningkatan dan standar mutu pendidikan. Strategi yang dilakukan meliputi: (1) penguatan system monitoring, akuntansi, dan audit diberbagai tingkatan agar dana operasional yang dikeluarkan tepat dan tepat guna, (2) penguatan manajemen sekolah/kapasitas tata kelola sehingga pemanfaatan dana sesuai dengan target pengembangan sekolah, (3) laporan tahunan tentang panduan anggaran operasional berdasarkan pada survai dan pengalaman dalam rangka mengoptimalkan peningkatan mutu dan akses.

- c. Penguatan Tata Kelola Berorientasi Mutu dan Mekanisme Akuntabilitas: Peningkatan mutu jelas membutuhkan kombinasistrategi *supply and demand*. Strategi prioritas yang dilakukan untuk memperkuat *demand side* adalah: (1) penggunaan informasi berkala tentang standar pendidikan di semua jenjang sebagai sebuah landasan bagi perbaikan perencanaan ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah, (2) meninjau variasi prestasi siswa/kinerja sekolah di kabupaten/kota, dan sekolah untuk dijadikan sebagai alat ukur perbaikan dan untuk kebutuhan strategi penyeimbangan pembiayaan, (3) penguatan standar dan sistem monitoring dan evaluasi, supervisi di kabupaten, menggunakan data standar untuk member informasi kepada DPRD dan Komite pemangku kepentingan lainnya untuk digunakan dalam usaha meninjau pendekatan yang telah dilakukan.

3. Sasaran dan Target Capaian

Sasaran dan target capaian program Peningkatan Mutu Pendidikan 2010-2011 adalah:

- a. Peningkatan keluaran (output) dan dampak (outcome) pendidikan mencakup kinerja siswa dan peningkatan mutu lulusan yang dapat dilihat antara lain melalui jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya,
- b. Peningkatan ketersediaan input pendidikan yang berorientasi mutu, terutama materi pengajaran, guru bermutu dan sistem pengawasan dan
- c. Peningkatan sistem penjaminan mutu, mencakup penetapan standar pendidikan, standar monitoring dan pengendalian standar-standar input termasuk infrastruktur.

4. Program Kegiatan

Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar dan pengendalian mutu pendidikan melalui upaya sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan dan menggunakan standar kemampuan lulusan setiap jenis dan jenjang pendidikan serta menyusun kurikulum yang berbasis pada standar kemampuan lulusan tersebut.
 - 2) Menyelenggarakan sistem ujian akhir sebagai alat *quality control* mutu kelulusan.
 - 3) Menyelenggarakan penilaian kemampuan dasar baca, tulis, hitung (calistung) pada tingkat sekolah dasar.
 - 4) Melakukan pemantauan mutu pendidikan melalui berbagai survei dan studi, khususnya dalam bidang reading literacy, mathematical literacy, economic literacy, dan scientific literacy.
 - 5) Menyusun standar kelayakan minimal sekolah/madrasah, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan institusi layanan pendidikan lainnya.
 - 6) Menetapkan dan menerapkan standar kompetensi minimal tenaga kependidikan.
 - 7) Menerapkan sistem *Quality Assurance* (QA) dan akreditasi sekolah dan lembaga layanan pendidikan lainnya.
- b. Pemberdayaan dan peningkatan kemampuan layanan sekolah dan lembaga luar sekolah melalui program tersebut:
 - 1) Melakukan rehabilitasi dan peningkatan sarana/prasarana sekolah/lembaga luar sekolah sesuai kebutuhan standar minimal kelayakan.
 - 2) Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kependidikan sesuai dengan standar kompetensi minimal yang telah ditetapkan.
 - 3) Meningkatkan jumlah ketersediaan buku pelajaran sehingga jumlah siswa yang memperoleh akses terhadap buku pelajaran meningkat.
 - 4) Meningkatkan kemampuan pembiayaan operasional sekolah/lembaga luar sekolah sesuai standar minimal pembiayaan.

- c. Peningkatan mutu proses penyelenggaraan pendidikan melalui upaya sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memungkinkan sekolah melakukan upaya peningkatan secara langsung dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
 - 2) Meningkatkan mutu proses belajar mengajar dengan meningkatkan jam efektif belajar serta *time on task*.
 - 3) Melakukan peranan pengawas pendidikan yang lebih berorientasi pada pengawasan mutu proses dan hasil belajar.
- d. Peningkatan kesadaran dan komitmen stakeholder pendidikan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan melalui program sebagai berikut:
- 1) Mendorong lembaga legislatif dan masyarakat agar peraturan perundangan di bidang pendidikan berorientasi pada upaya perluasan dan sekaligus peningkatan mutu pendidikan dapat diterbitkan.
 - 2) Melakukan kampanye gerakan peningkatan mutu pendidikan ke berbagai stakeholder pendidikan dan masyarakat melalui berbagai forum dan media.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program PAUD pada tahun 2011 telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian APK PAUD sebesar 34,54%, meningkat dari tahun 2010 sebesar 31,03%.
2. Pemerintah telah berhasil melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar (Dikdas) 9 tahun bagi penduduk usia 7-12 tahun. Hal ini terlihat dari meningkatnya APM SD/MI/Paket A dari 95,46% pada tahun 2010, menjadi 95,50 % pada tahun 2011. Demikian APK SMP/MTs/Paket B meningkat dari 98,20% pada tahun 2010 menjadi 99,47% pada tahun 2011.
3. Program pendidikan keaksaraan, Indonesia telah mencapai 50% pada tahun 2008 dari target yang ditetapkan pada Konvensi Dakar tahun 2015. Angka melek huruf pada tahun 2011 telah mencapai 95,2%.
4. Program pendidikan kecakapan hidup (PKH) telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu (1) sebesar 13,0% anak putus sekolah dan yang telah lulus SMA/SMK/MA tidak pendidikannya telah mendapat layanan pendidikan PKH bersertifikasi disertai penempatan kerja; (2) sebesar 11% lulusan PKH bersertifikat kompetensi.
5. Persamaan gender telah mencapai keseimbangan antara anak laki-laki dan anak perempuan di setiap tingkatan pendidikan. Persentase perempuan melek aksara meningkat dari 93,62% pada tahun 2010 menjadi 94,13% pada tahun 2011. Sedangkan persentase perempuan tuna aksara turun dari 6,38% pada tahun 2010 menjadi tinggal 5,83% pada tahun 2011.
6. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan telah melaksanakan program kualifikasi dan sertifikasi guru. Pada tahun 2011 guru SD/MI yang telah berkualifikasi pendidikan S1/D4 sebesar 49,96% (tahun 2010 sebesar 37,28%); guru SMP/MTs sebesar 82,80% (tahun 2010 sebesar 77,10%); guru SMA/MA sebesar 93,90 % (tahun 2010 sebesar 92,20%); guru SMK sebesar 89,50 % (tahun 2010 sebesar 87,60%). Sedangkan guru yang telah bersertifikasi pada tahun 2011, untuk guru SD/MI sebesar 40,00% (tahun 2010 sebesar 26,00 %); guru SMP/Mts sebesar 56,00% (tahun 2010 sebesar 44,00%); guru SMA/MA sebesar 61.00% (tahun 2010 sebesar 51,00%); guru SMK sebesar 55,0% (tahun 2010 sebesar 44,00%).

Demikian juga lembaga persekolahan telah meningkat akreditasi lembaganya. Untuk PAUD pada tahun 2011 sebesar 53,30 % (tahun 2010 sebesar 44,50%); SD/MI sebesar 75,20 % (tahun 2010 sebesar 70,20%); SMP/MTs sebesar 72,60 % (tahun 2010 sebesar 66,80%); SMA/MA/SMK sebesar 76,50 % (tahun 2010 sebesar 70,70%).

B. Rekomendasi

Pendidikan Untuk Semua (PUS) merupakan kesepakatan bersama antar negara-negara anggota UNESCO tahun 2000 di Dakar Senegal. PUS memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2015. Terkait dengan hal tersebut koordinasi antara Forum Koordinasi Nasional PUS dengan Forum Koordinasi PUS di daerah agar tetap dilakukan pada setiap awal tahun anggaran. Dalam koordinasi tersebut perlu dibahas dan disepakati program-program strategis terkait dengan pencapaian target PUS tiap tahun hingga tahun 2015.